



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan masyarakat dan melestarikan nilai sosial budaya dan dalam rangka upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya Daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk itu perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ;
- b. bahwa untuk menetapkan Hari Jadi Kota Pangkalpinang telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menggali sejarah tentang terbentuknya Kota Pangkalpinang, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang, setelah mendapat masukan-masukan dari sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, para anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta hasil penilaian buku dan sejarah yang telah disosialisasikan dan diinformasikan pada tanggal 10 Agustus 2010 maka ditentukanlah Hari Jadi Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan kajian dan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Perumus maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonom Kota ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonom Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2001 Nomor 07 seri D Nomor 07) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA  
PANGKALPINANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Pangkalpinang ;
8. Kelurahan atau sebutan lain adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan ;
9. Hari Jadi Kota Pangkalpinang adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kota Pangkalpinang;
10. Naskah riwayat singkat adalah himpunan data yang diperoleh dari berbagai unsur yang telah disusun secara sistematis.
11. Peringatan Hari Jadi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tepat pada tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

## **BAB II**

### **PENETAPAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Berdasarkan hasil kajian socio historis maka Hari Jadi Kota ditetapkan pada tanggal 17 September 1757 Masehi.
- (2) Naskah Berita Acara Penetapan Hari Jadi Kota yang merupakan hasil kajian Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Riwayat Singkat Hari Jadi Kota Pangkalpinang, tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Naskah Akademis Penetapan hari Jadi Kota yang merupakan kajian tentang Hari jadi Kota, tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Hari jadi Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan hari bersejarah yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota setiap tanggal 17 September.
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota wajib diperingati oleh Pemerintah Kota dan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat melalui koordinasi Instansi terkait guna menyebarluaskan serta mendorong keikutsertaan seluruh masyarakat Kota dalam

rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya.

- (3) Pada upacara Peringatan hari Jadi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda pembacaan naskah riwayat singkat Hari Jadi Kota dan perkembangannya.

#### **Pasal 4**

Dalam memperingati Hari Jadi Kota, dapat dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :

- a. kegiatan olahraga ;
- b. Kegiatan kesenian ;
- c. Kegiatan sosial dan atau keagamaan ;
- d. Kegiatan ilmiah ;
- e. Kegiatan ekonomi.

#### **Pasal 5**

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonom Kota Pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Oktober 2010**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Oktober 2010**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 29**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang  
Nomor : 21 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Oktober 2010

## **BERITA ACARA PENETAPAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG**

Nomor : 02 TAHUN 2010

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Hardi, SH, MH  
NIP : 196110131981011001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ( I )

2. Nama : 1. Drs. Akhmad Elvian ( Koordinator )  
2. Drs.H. Kamaruddin AK ( Anggota )  
3. Drs.H. Sjahrum HS, MM ( Anggota )  
4. Suhaimi Sulaiman, BA ( Anggota )  
5. H. Farid Effendi, SH, MH ( Anggota )  
6. Drs.H. Anwar Effendi, MM ( Anggota )  
7. H. Nurdin Yusuf, S.Pd ( Anggota )  
8. Drs. Edison Taher ( Anggota )  
9. Ir. Hongki Listiadi ( Anggota )

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ( II )

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU ( I ) dan PIHAK KEDUA (II) dengan ini menyepakati bahwa hasil rapat Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2010 menyatakan tahun 1757 M merupakan tahun Hari Jadi Kota Pangkalpinang setelah melalui hasil kajian sosio historis pada masa jabatan Susuhunan Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, yang untuk pertama kali disebut nama Pangkalpinang sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang.
2. PIHAK KESATU ( I ) dan PIHAK KEDUA ( II ) sepakat untuk penentuan tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Pangkalpinang harus tetap berorientasi dan merujuk pada dokumen sejarah yang sama agar tetap terjaga hubungan yang kuat dan lebih rasional antara tahun keberadaannya dengan peristiwa sejarah yang meliputinya.
3. PIHAK KESATU ( I ) dan PIHAK KEDUA ( II ) sepakat bahwa tanggal dan bulan pelantikan Susuhunan Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, lebih mendekati kebenaran untuk dijadikan tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, karena keterkaitan yang paling dekat dengan keberadaan Kota Pangkalpinang pada sejarah kemunculannya sebagai Kota.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang ( Pihak Kesatu ) dan Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang ( Pihak Kedua ) sepakat menetapkan :

1. Bahwa hari Jadi Kota Pangkalpinang adalah tanggal 17 September 1757, bertepatan dengan wafatnya Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo dan diangkatnya Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai Sultan Palembang Darussalam.

2. Bahwa Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tetap berdasarkan pada pendekatan Socio Historis karena keberadaannya dibangun pada masa Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo untuk dijadikan tempat kedudukan Demang dan Jenang yang bertugas untuk mengawasi parit-parit timah sebagai sumber penerimaan bagi Kesultanan Palembang Darussalam.

Demikianlah Berita Acara Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ini dibuat dengan dilandasi rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA (II),  
TIM PERUMUS HARI JADI

1. Drs. Akhmad Elvian

(Koordinator)

2. Drs.H. Kamaruddin AK

(Anggota)

3. Drs.H. Sjahrum HS, MM

(Anggota)

4. Suhaimi Sulaiman, BA

(Anggota)

5. H.Farid Effendi, SH,MH

(Anggota)

6. Drs. H. Anwar Effendi,MM

(Anggota)

7. H. Nurdin Yusuf, S.Pd

(Anggota)

8. Drs. Edison Taher

(Anggota)

9. Ir. Hongki Listiadi

(Anggota)

PIHAK KESATU ( I ),  
SEKRETARIS DAERAH KOTA,



H. HARDI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.196110131981011001

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang  
Nomor : 21 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Oktober 2010

## **RIWAYAT SINGKAT KOTA PANGKALPINANG**

Dalam bahasa Melayu, istilah kota memiliki pengertian yang serupa dengan pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Disamping arti kata kota secara leksikografis, para ahli mengemukakan pula pengertian-pengertian tentang kota berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Sebagai contoh kota diartikan sebagai permukiman yang permanen, relatif luas, penduduknya padat serta heterogen dan memiliki organisasi-organisasi politik, ekonomi, agama dan budaya (Sirjamaki, 1964:4-6). Bahkan ahli perkotaan berbangsa Perancis, Dora Jane Hamblin mengemukakan, bahwa kota adalah tempat yang dihuni secara permanen oleh suatu kelompok yang lebih besar dari suatu komunitas. Di kota terjadi suatu pembagian kerja, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan diferensiasi fungsi, hak dan tanggung jawab.

Memang dalam berbagai definisi tentang kota tercakup unsur keluasan wilayah, kepadatan penduduk yang bersifat heterogen dan bermata pencaharian non pertanian, serta fungsi administratif-ekonomi-budaya. Unsur-unsur tersebut terwujud pula ke dalam fisik kota sehingga terbentuklah ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri tersebut kemudian sebagian tertinggal sebagai data arkeologi, sejarah, arsitektur, dan sebagian lain yang lebih besar jumlahnya musnah oleh faktor alam dan manusia. Data-data tersebut berupa artefak dalam berbagai bentuk, tata ruang. Sedangkan data non artefak yang ditinggalkan suatu kota berupa tradisi, seni dan toponim. Di Indonesia, kota-kota kuno biasanya berdiri di daerah pantai, di tepi sungai, atau di lembah-lembah dengan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana baik politik, keamanan, ekonomi, keagamaan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang lain. Tampaknya lokasi suatu kota pada zaman dahulu dipilih berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang menyangkut aspek-aspek tersebut di atas.

Aspek-aspek di atas ternyata secara langsung dialami pula oleh Kota Pangkalpinang. Secara etimologis Pangkalpinang berasal dari kata pangkal atau pengkal dan Pinang (*areca chatecu*). Pangkal atau pengkal yang dalam bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal, atau dapat diartikan pada awal mulanya sebagai pusat pengumpulan Timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu (wangkang) dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai. Sebagai pusat segala aktifitas, sebutan Pangkal atau Pengkal juga digunakan oleh orang Bangka masa lalu untuk penyebutan daerah-daerah seperti Pangkal Bulu, Pangkal Raya, Pangkal Menduk, Pangkal Mangas, Pangkal Lihat yang kemudian menjadi Sungai Lihat atau Sungailiat sekarang. Sedangkan Pinang (*areca chatecu*) adalah nama sejenis tumbuhan Palm yang multi fungsi dan banyak tumbuh di Pulau Bangka.

Pusat pemukiman awal Pangkalpinang dibangun ditepi Sungai yang membelah Kota Pangkalpinang. Proses pembentukan Pangkalpinang menjadi sebuah kota seperti sekarang sangatlah panjang dan berakar, dimulai dari ditemukannya biji timah yang terkandung hampir di seluruh pelosok Pulau Bangka, sampai upaya eksploitasi timah dan hasil bumi Pulau Bangka seperti Lada Putih, Karet dan Damar oleh berbagai bangsa. Pembentukan Pangkalpinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin-batin, baik Batin Pesirah maupun Batin Pengandang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari Pangkal atau Pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja-pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Siam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Palembang Darussalam. Diantara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang yang kita kenal sekarang.

Dari tinjauan sejarah dengan dasar kajian yang jelas dan literatur dari Tim Perumus hari Jadi Kota Pangkalpinang, berdirinya Pangkalpinang diprediksi jatuh pada 17 September 1757 yakni di masa pemerintahan Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo. Di masa pemerintahannya, Beliau sudah membentuk 14 Pangkal di Pulau Bangka termasuk di dalamnya Pangkalpinang.

Lantas apa latar belakang dipilihnya tanggal tersebut? Saat perwakilan dari tim perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang bersama perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan studi banding ke UPT Permuseuman Palembang, diperoleh informasi yang cukup jelas, bahwa pada tahun 1724 sampai dengan 1757, Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo. Namun setelah ia wafat pada tanggal 17 September 1757, diangkatlah Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai penggantinya menjadi Sultan Palembang. Sebelum Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo wafat, Beliau sudah memberikan titah dan kuasa untuk mengelola tata pemerintahan serta mencari dan memperluas daerah kesultanan kepada Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo. Perlu diketahui, ciri khas kesultanan, jika pemimpin atau sultan meninggal, maka di hari meninggalnya sultan itulah diangkat pengganti untuk meneruskan pemerintahan. Maka dari keterangan di atas, dapat ditarik simpulan, bahwa hari lahir Kota Pangkalpinang adalah pada tanggal 17 September 1757, bertepatan dengan meninggalnya Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo dan diangkatnya Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai penggantinya menjadi Sultan Palembang.

Setelah Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo memimpin, ia segera memerintahkan Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin-batin, baik Batin Pesirah maupun Batin Pengandang serta kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari Pangkal atau Pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja-pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Siam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Palembang

Darussalam. Diantara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang yang kita kenal sekarang.

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang  
Nomor : 21 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Oktober 2010



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

### **NASKAH AKADEMIS**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG**

**TAHUN 2010**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas selesainya "Naskah Akademis Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang". Naskah akademis ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, dari dimensi teoritik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan hari jadi Kota Pangkalpinang. Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan naskah akademis ini dan dalam penulisan rancangan pertauran daerah selanjutnya.

Tim Pengkaji Hari Jadi Kota  
Pangkalpinang Pemerintah Kota  
Pangkalpinang

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	2	
<b>Daftar Isi</b>	3	
<b>BAGIAN KESATU</b>		
<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1	Latar Belakang	5
a.	Pokok Pikiran tentang konstataasi fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus segera diatur.	5
b.	Daftar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang bersangkutan.	7
2	Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai	9
3.	Metode Pendekatan	9
4.	Pengorganisasian	10
<b>Bab II</b>	<b>TINJAUAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG</b>	
1.	Tinjauan Normatif	12
2.	Tinjauan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	12
a.	Beberapa Peristiwa Penting berkenaan dengan sejarah hari lahir Kota Pangkalpinang	19
b.	Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	31
<b>Bab III</b>	<b>RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIS</b>	
1.	Ketentuan Umum	38
2.	Materi	38
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
1.	Kesimpulan	40
<b>LAMPIRAN/DAFTAR PUSTAKA</b>		41
<b>BAGIAN KEDUA</b>		
<b>I.</b>	<b>KONSIDERAN</b>	49
<b>II.</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	49
<b>III.</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	52
<b>IV.</b>	<b>MATERI</b>	52
<b>V.</b>	<b>KETENTUAN PIDANA</b>	52
<b>VI.</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	52

# **BAGIAN KESATU**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

#### **a. Pokok Pikiran tentang konstataasi fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus segera diatur.**

Sejarah adalah topik ilmu pengetahuan yang sangat menarik. Tak hanya itu, sejarah juga mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama mengenai: keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah negara atau sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam, sepanjang zaman.

Salah satu kutipan yang paling terkenal mengenai sejarah dan pentingnya kita belajar mengenai sejarah ditulis oleh seorang filsuf dari Spanyol, George Santayana. Katanya: "Mereka yang tidak mengenal masa lalunya, dikutuk untuk mengulangnya." Filsuf dari Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan dalam pemikirannya tentang sejarah: "Inilah yang diajarkan oleh sejarah dan pengalaman: bahwa manusia dan pemerintahan tidak pernah belajar apa pun dari sejarah atau prinsip-prinsip yang didapat darinya." Kalimat ini diulang kembali oleh negarawan dari Inggris Raya, Winston Churchill, katanya: "Satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya." Winston Churchill, yang juga mantan jurnalis dan seorang penulis memoar yang berpengaruh, pernah pula berkata "Sejarah akan baik padaku, karena aku akan menuliskannya." Tetapi sepertinya, ia bukan secara literal merujuk pada karya tulisnya, tetapi sekadar mengulang sebuah kutipan mengenai filsafat sejarah yang terkenal: "Sejarah ditulis oleh sang pemenang." Maksudnya, seringkali pemenang sebuah konflik kemanusiaan menjadi lebih berkuasa dari taklukkannya. Oleh karena itu, ia lebih mampu untuk meninggalkan jejak sejarah -- dan pemelesetan fakta sejarah -- sesuai dengan apa yang mereka rasa benar.

Pandangan yang lain lagi menyatakan bahwa kekuatan sejarah sangatlah besar sehingga tidak mungkin dapat diubah oleh usaha manusia. Atau, walaupun mungkin ada yang dapat mengubah jalannya sejarah, orang-orang yang berkuasa biasanya terlalu dipusingkan oleh masalahnya sendiri sehingga gagal melihat gambaran secara keseluruhan. Masih ada pandangan lain lagi yang menyatakan bahwa sejarah tidak pernah berulang, karena setiap kejadian sejarah adalah unik. Dalam hal ini, ada banyak faktor yang menyebabkan berlangsungnya suatu kejadian sejarah; tidak mungkin seluruh faktor ini muncul dan terulang lagi. Maka, pengetahuan yang telah dimiliki mengenai suatu kejadian di masa lampau tidak dapat secara sempurna diterapkan untuk kejadian di masa sekarang. Tetapi banyak yang menganggap bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena pelajaran sejarah tetap dapat dan harus diambil dari setiap kejadian sejarah. Apabila sebuah kesimpulan umum dapat dengan seksama diambil dari kejadian ini,

maka kesimpulan ini dapat menjadi pelajaran yang penting. Misalnya: kinerja respon darurat bencana alam dapat terus dan harus ditingkatkan; walaupun setiap kejadian bencana alam memang, dengan sendirinya. kadang sejarah suatu kota lebih tua dari pada sejarah negaranya. Di situlah uniknya suatu kota. Berawal dari pertemuan antara manusia dengan manusia lain, melakukan aktivitas, baik berdagang, berinteraksi, berkeluarga, hingga membentuk komunitas. Maka terbentuklah suatu kota.

Kota Pangkalpinang dari tempo dulu hingga saat ini merupakan salah satu kota yang memiliki rekam jejak historis yang panjang dan sangat luar biasa. Nilai historis ini setidaknya dapat dilestarikan sebagai khazanah sejarah dan budaya terbesar khususnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun dari gempitanya nama besar Pangkalpinang di kancah lokal, regional dan nasional, ada beberapa hal yang kurang dan patut kita perbaiki dan sempurnakan. Sejak beberapa dekade ke belakang, hingga saat ini hari Jadi Kota Pangkalpinang belum ditunjukkan pada satu manuskrip yang memadai.

Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang yang selama ini diperingati hanya berdasarkan pembentukan Kota Pangkalpinang sebagai daerah otonom yang diperingati setiap tanggal 14 November dengan dasar pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Pada waktu itu kota Pangkalpinang hanya memiliki luas 31,7 Km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah sekitar 50.000 orang. Kota kecil Pangkalpinang terdiri atas 2 (dua) gemeente yaitu gemeente Pangkalpinang dan Gemeente Gabekdan batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur Nomor 2615/BFg tanggal 30 September 1919. Pertanyaannya kapan hari jadi Kota Pangkalpinang dalam perspektif sejarah?

Untuk mengetahui dan menelusuri hari jadi Kota Pangkalpinang, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 308/KEP/ORG/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Pembentukan Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang. masing-masing bertugas untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing dari berbagai sumber dan kajian ilmiah maupun sosial historis untuk mencari data dan fakta yang jelas tentang keberadaan Kota Pangkalpinang.

Hasil pekerjaan Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang. ini, disajikan dalam suatu naskah akademis yang diberi judul naskah akademis Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang. Setelah dikemas oleh tim kajian. Tim ini juga bertanggung jawab menyiapkan proses dan memilih metodologi sebagai landasan berpijak dari keseluruhan rangkaian aktivitas yang berujung pada dokumen ini. Oleh karena itu, disamping berisi muatan pokok tentang rasionalitas perlunya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, didalam naskah ini juga terselip paparan tentang proses yang dilalui dan metodologi yang digunakan untuk sampai pada hasil berupa naskah akademis ini.

**b. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang bersangkutan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonom Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2001 Nomor 07 Seri D Nomor 7).

## **2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai**

- a. Kota Pangkalpinang perlu memiliki peristiwa sejarah yang dapat melahirkan angan angan moral, menjadi sumber inspirasi dan edukasi sebagai pedoman perilaku, yang dapat dijadikan sebagai faktor pemicu semangat (switch match) mentalitas dan moralitas untuk membangun Pangkalpinang, Istilah lainnya Kota ini memerlukan peristiwa panutan sebagai simbolik yang dapat menjadi monument hidup (living monument), terutama sebagai modal dasar untuk membangun jiwa masyarakat sebelum membangun raganya”;
- b. Mencari jejak pasti terbentuknya Kota Pangkalpinang melalui penelitian yang komprehensif baik secara literatur maupun secara historis dan sumbang saran dengan nara sumber dan tokoh masyarakat Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Walikota Pangkalpinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang;

- c. Penetapan Hari jadi merupakan sejarah autentik bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Masyarakat Kota Pangkalpinang, yang diperingati dan dirayakan, sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Metode Pendekatan**

Penyiapan naskah akademis mengikuti metodologi studi kasus yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, dan menyeluruh atas objek/peristiwa tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu dan lingkungan tertentu. Peneliti /periset dapat bersama-sama dengan pengambil keputusan berusaha menemukan hubungan atas faktor-faktor dominan atas permasalahan /peristiwa. Selain itu dapat saja menemukan hubungan-hubungan yang tadinya tidak direncanakan atau terpikirkan. Keunggulan metode studi kasus antara lain hasilnya dapat mendukung studi-studi yang lebih besar dikemudian hari, ataupun dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Metode ini juga memiliki kelemahan-kelemahan, misalnya kajian menjadi relatif kurang luas, sulit digeneralisasikan dengan keadaan yang berlaku umum, dan cenderung subjektif, karena objek penelitian dapat mempengaruhi prosedur penelitian yang harus dilakukan. Maka beberapa dimensi atas suatu peristiwa dilakukan kajian secara detail, mendalam dan menyeluruh, dan dicari tahu bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor /peristiwa yang ada dengan permasalahan yang ada. Jadi, informasi dari hasil riset /penelitian tersaji secara menyeluruh dan mendalam.

Pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa tulisan, hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis, dan diskusi kelompok terfokus dengan tokoh-tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, praktisi pendidikan dan para pengambil kebijakan.

### **4. Pengorganisasian**

Penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan pengkajian dan penelusuran kembali keberadaan Pangkalpinang, atas bukti-bukti sejarah yang ada. Untuk itu Penyusunan naskah akademis Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, diselenggarakan dengan berdasar kepada Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 165/KEP/ORG/III/2010 tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembuatan lambing daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 307/KEP/ORG/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 165/KEP/ORG/III/2010 tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembuatan lambing daerah Kota Pangkalpinang, dan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 308/KEP/ORG/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Pembentukan Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

Pada prinsipnya, kegiatan penelusuran /pengkajian hari jadi Kota Pangkalpinang, dapat dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas utama. Pertama adalah penyelenggaraan seminar Penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 April 2010, dimulai dari pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Edotel, SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Jalan Girimaya Pangkalpinang. Maksud dan tujuan dilaksanakan seminar ini adalah untuk mengakomodir berbagai aspek sehingga kita dapat menentukan satu hari yang

paling bersejarah bagi Kota Pangkalpinang, dengan mengadopsi semua masukan dari berbagai pihak. Nara Sumber berasal dari Tokoh masyarakat dan sesepuh Kota Pangkalpinang, antara lain Bapak Drs. Akhmad Elvian (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang); Bapak H. Nurdin Yusuf, S.Pd; dan Bapak Drs.H. Kamaruddin, AK.

Kedua, aktivitas penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yakni tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada seminar pertama sekaligus menemukan penjelasan dan juga solusi atas masalah dimaksud.

Aktivitas ketiga berupa pelaksanaan sosialisasi dan informasi atas hasil kerja tim perumus hari jadi Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertempat di Hotel Edotel SMK Negeri 3 Pangkalpinang Jalan Girimaya Pangkalpinang. Acara dimaksud menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Tokoh Masyarakat, pemuda dan pimpinan media di Kota Pangkalpinang, dengan acara utamanya berisi pemaparan hasil kerja Tim penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, pemaparan tim Logo Daerah Kota Pangkalpinang, pemaparan tim Hymne Kota Pangkalpinang berikut diperdengarkan hymne dan mars Kota Pangkalpinang oleh paduan suara Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang. rancangan studi para peneliti untuk ditanggapi oleh peserta workshop yang menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Tokoh Masyarakat, pemuda dan pimpinan media di Kota Pangkalpinang.

Masukan dan ulasan yang diperoleh dari sosialisasi dan informasi menjadi bahan perbaikan naskah penelitian akhir yang kemudian membentuk naskah akademis ini. Seluruh rangkaian kegiatan penyiapan naskah berlangsung selama 5 (lima) bulan.

## BAB II TINJAUAN HARI JADI KOTA PANGKALPINANG

### 1. Tinjauan Normatif

Setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Masa lalu yang pantas dikenang, baik yang menyenangkan maupun yang membuat manusia sedih dalam hidupnya. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun dan seterusnya yang telah dilewati oleh manusia merupakan bagian dari masa lalu. Masa lalu sering disebut dengan istilah Sejarah. Dilihat dari asal usul kata, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu Syajaraton yang artinya pohon, keturunan, asal usul atau silsilah. Dalam bahasa Inggris (history), Bahasa Yunani (istoria), Bahasa Jerman (geschichte).

**Sejarah**, dalam bahasa Indonesia dapat berarti riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal usul keturunan (terutama untuk raja-raja yang memerintah). Umumnya sejarah dikenal sebagai informasi mengenai kejadian yang sudah lampau. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, mempelajari sejarah berarti mempelajari dan menerjemahkan informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh orang perorang, keluarga, dan komunitas. Pengetahuan akan sejarah melingkupi: pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Dahulu, pembelajaran mengenai sejarah dikategorikan sebagai bagian dari Ilmu Budaya (Humaniora). Akan tetapi, di saat sekarang ini, Sejarah lebih sering dikategorikan sebagai Ilmu Sosial, terutama bila menyangkut peruntukan sejarah secara kronologis.

Ilmu Sejarah mempelajari berbagai kejadian yang berhubungan dengan kemanusiaan di masa lalu. Sejarah dibagi ke dalam beberapa sub dan bagian khusus lainnya seperti kronologi, historiograf, genealogi, paleografi, dan kliometrik. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah disebut **sejarawan**. Ilmu Sejarah juga disebut sebagai Ilmu Tarikh atau Ilmu Babad.

Pengertian Sejarah menurut Para Ahli Sejarah, antara lain:

- 1). Moh. Yamin, Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan.
- 2). R.Moh Ali, pengertian sejarah ada 3 yaitu:Sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seluruhnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia; Sejarah adalah cerita yang tersusun secara sistematis (serba teratur dan rapi); Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau.
- 3). Patrick Gardiner, Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia.

- 4). J.V Brice, Sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Pengertian sejarah berbeda dengan pengertian Ilmu sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu manusia sedangkan Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia.

Karakteristik ilmu Sejarah *unik*, artinya peristiwa sejarah hanya terjadi sekali, dan tidak mungkin terulang peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. *Penting*, artinya peristiwa sejarah yang ditulis adalah peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan manusia *Abadi*, artinya peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa.

#### **a. Sejarah Sebagai Peristiwa**

Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, aktualitas yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada masa lalu, disebut sejarah sebagai objek. Sejarah sebagai kisah adalah cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan pendapat seseorang, memori, kesan atau tafsiran manusia terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Disebut sejarah sebagai subyek yang artinya sejarah tersebut telah mendapatkan penafsiran dari penyusunan cerita sejarah. Dalam hal ini sejarawan mempunyai peran sebagai "*The Man Behind the Gun*", artinya mereka menyusun cerita sejarah berdasarkan jejak-jejak sejarah (sejarah sebagai peristiwa) namun tetap dipengaruhi oleh sudut pandang sejarawan itu sendiri.

#### **b. Sejarah sebagai Ilmu**

Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah.

*Syarat pokok sejarah disebut sebagai ilmu* adalah:

- 1). Obyek yang definitive;
- 2). Adanya formulasi kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya;
- 3). Metode yang efisien;
- 4). Menggunakan sistem penyusunan tertentu.

Sejarah sebagai seni merupakan cara bagaimana membuat pembaca sejarah tertarik atas informasi kejadian masa lalu yang disajikan karena unsur keindahan yang disertakan di dalam menyajikan informasi sejarah di masa lalu sehingga akan mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Sejarah berperan sebagai seni sangat terkait sekali dengan cara penulisan sejarah itu sendiri.

Guna Sejarah, Keberadaan suatu ilmu yang ada di dunia ini tidak akan langgeng tanpa adanya kesadaran akan manfaatnya bagi manusia. Demikian pula dengan ilmu sejarah. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ilmu sejarah memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Guna Edukatif (memberi pendidikan), Nilai sejarah terletak pada kenyataan, apa yang terjadi pada masa lalu memberikan pelajaran bagi manusia yang telah melewatinya. Guna edukatif berarti sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya karena semangat sebenarnya dari kepentingan mempelajari sejarah adalah nilai kemasakiniannya.
- 2) Guna Instruktif (memberi pengajaran),  
Guna Instruktif artinya sejarah dapat memberikan pelajaran mengenai sesuatu baik keterampilan maupun pengetahuan,
- 3) Guna Inspiratif (memberi inspirasi)  
Guna Inspiratif artinya kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat memberikan ilham, ide-ide atau inspirasi bagi manusia pada masa sekarang.  
Contoh: kebesaran kerajaan-kerajaan pada masa lalu di Nusantara memberikan ilham kepada para pendiri bangsa untuk membangun kembali kebesaran masa lampau tersebut.
- 4) Guna Rekreatif (memberi kesenangan), Sejarah merupakan suatu kreasi seni, sehingga dapat menghadirkan kesenangan batin. Contoh: kita berkunjung ke Candi Borobudur, dengan berkunjung kesana kita bisa membayangkan pembangunan pada masa itu. Dimulai dari jumlah pekerjaannya, arsiteknya, lama pembangunan dan tujuannya dan sebagainya sehingga dalam hati dan pikiran kita akan menembus dimensi waktu.

Sejarah memiliki dua dimensi yaitu dimensi spasial (ruang) dan dimensi temporal (waktu). Konsep waktu dalam sejarah meliputi waktu atau tempo (time) yaitu proses kelangsungan suatu peristiwa dan waktu merupakan kesatuan dari kelangsungan tiga dimensi yaitu masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian periodisasi sejarah berkaitan erat dengan pembagian masa lampau manusia berdasarkan urutan waktu (Periodisasi = Pembabagan waktu). Pentingnya periodisasi dalam sejarah yaitu:

- 1) Memudahkan sistematika penulisan sejarah;
- 2) Merupakan rangkuman dari suatu peristiwa menurut seorang sejarawan;
- 3) Memudahkan pembaca dalam memahami suatu peristiwa sejarah;
- 4) Merupakan penghubung dari fakta-fakta sejarah.

Kronologi sejarah, Adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian suatu peristiwa sejarah secara gamblang yang dapat mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain secara logis. Kronologi sejarah sangat diperlukan karena dapat mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam bentuk kausalitas atau sebab akibat.

Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah atau ahli sejarah disebut *sejarawan*. Kata *sejarah* secara harafiah berasal dari kata Arab (تاريخ: *šajaratun*) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut *tarikh* (تاريخ). Adapun kata *tarikh* dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah *waktu* atau *penanggalan*. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu *historia* yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *history*, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah *Geschichte* yang berarti sudah terjadi.

Karena lingkup sejarah sangat besar, perlu klasifikasi yang baik untuk memudahkan penelitian. Bila beberapa penulis seperti H.G. Wells, Will Durant, dan Ariel Durant menulis sejarah dalam lingkup umum, kebanyakan sejarawan memiliki keahlian dan spesialisasi masing-masing. Ada banyak cara untuk memilah informasi dalam sejarah, antara lain:

- Berdasarkan kurun waktu (kronologis).
- Berdasarkan wilayah (geografis).
- Berdasarkan negara (nasional).
- Berdasarkan kelompok suku bangsa (etnis).
- Berdasarkan topik atau pokok bahasan (topikal).

Dalam pemilahan tersebut, harus diperhatikan bagaimana cara penulisannya seperti melihat batasan-batasan temporal dan spasial tema itu sendiri. Jika hal tersebut tidak dijelaskan, maka sejarawan mungkin akan terjebak ke dalam falsafah ilmu lain, misalnya sosiologi. Inilah sebabnya Immanuel Kant yang disebut-sebut sebagai Bapak Sosiologi mengejek sejarah sebagai "penata batu-bata" dari fakta-fakta sosiologis. Banyak orang yang mengkritik ilmu sejarah. Para pengkritik tersebut melihat sejarah sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak memenuhi faktor-faktor keilmuan, terutama faktor "dapat dilihat atau dicoba kembali", artinya sejarah hanya dipandang sebagai pengetahuan belaka, bukan sebagai ilmu. Sebenarnya, pendapat ini kurang bisa diterima akal sehat karena sejarah mustahil dapat diulang walau bagaimana pun caranya karena sejarah hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Walau mendapat tantangan sedemikian itu, ilmu sejarah terus berkembang dan menunjukkan keeksisannya dalam tataran ilmu.

Ahli sejarah mendapatkan informasi mengenai masa lampau dari berbagai sumber, seperti catatan yang ditulis atau dicetak, mata uang atau benda bersejarah lainnya, bangunan dan monumen, serta dari wawancara (yang sering disebut sebagai "sejarah penceritaan", atau *oral history* dalam bahasa Inggris). Untuk sejarah modern, sumber-sumber utama informasi sejarah adalah: foto, gambar bergerak (misalnya: film layar lebar), audio, dan rekaman video. Tidak semua sumber-sumber ini dapat digunakan untuk penelitian sejarah, karena tergantung pada periode yang hendak diteliti atau dipelajari. Penelitian sejarah juga bergantung pada historiografi, atau cara pandang sejarah, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada banyak alasan mengapa orang menyimpan dan menjaga catatan sejarah, termasuk: alasan administratif (misalnya: keperluan sensus, catatan pajak, dan catatan perdagangan), alasan politis (guna memberi pujian atau kritik pada pemimpin negara, politikus, atau orang-orang penting),

alasan keagamaan, kesenian, pencapaian olah raga (misalnya: rekor Olimpiade), catatan keturunan (genealogi), catatan pribadi (misalnya surat-menyurat), dan hiburan. Namun dalam penulisan sejarah, sumber-sumber tersebut perlu dipilah-pilah. Metode ini disebut dengan kritik sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstern dan intern. Kritik ekstern adalah kritik yang pertama kali harus dilakukan oleh sejarawan saat dia menulis karyanya, terutama jika sumber sejarah tersebut berupa benda. Yakni dengan melihat validasi bentuk fisik karya tersebut, mulai dari bentuk, warna dan apa saja yang dapat dilihat secara fisik. Sedang kritik intern adalah kritik yang dilihat dari isi sumber tersebut, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Wawancara juga dipakai sebagai sumber sejarah. Namun perlu pula sejarawan bertindak kritis baik dalam pemilahan narasumber sampai dengan translasi ke bentuk digital atau tulisan.

Ahli-ahli sejarah terkemuka yang membantu mengembangkan metode kajian sejarah antara lain: Leopold von Ranke, Lewis Bernstein Namier, Geoffrey Rudolf Elton, G. M. Trevelyan, dan A. J. P. Taylor. Pada tahun 1960an, para ahli sejarah mulai meninggalkan narasi sejarah yang bersifat epik nasionalistik, dan memilih menggunakan narasi kronologis yang lebih realistik. Ahli sejarah dari Perancis memperkenalkan metode sejarah kuantitatif. Metode ini menggunakan sejumlah besar data dan informasi untuk menelusuri kehidupan orang-orang dalam sejarah. Ahli sejarah dari Amerika, terutama mereka yang terilhami zaman gerakan hak asasi dan sipil, berusaha untuk lebih mengikutsertakan kelompok-kelompok etnis, suku, ras, serta kelompok sosial dan ekonomi dalam kajiannya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ilmuwan posmodernisme dengan keras mempertanyakan keabsahan dan perlu tidaknya dilakukan kajian sejarah. Menurut mereka, sejarah semata-mata hanyalah interpretasi pribadi dan subjektif atas sumber-sumber sejarah yang ada. Dalam bukunya yang berjudul *In Defense of History* (terj: Pembelaan akan Sejarah), Richard J. Evans, seorang profesor bidang sejarah modern dari Univeritas Cambridge di Inggris, membela pentingnya pengkajian sejarah untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa pendekatan masalah yang mungkin timbul dalam penelusuran sejarah, adalah:

- 1) Bahwa dalam kajian sejarah kehadiran suatu komunitas, tidak selalu modal pembangunannya diperoleh dari aspek ekonomi yang digali dari sumber daya alam tetapi ternyata juga dapat berasal dari aspek sosial dan budaya. Ini membuktikan bahwa nilai simbolik suatu peristiwa sejarah adalah penting bagi pembentukan identitas suatu masyarakat;
- 2) Bahwa sejarah dari suatu peristiwa dan proses terbentuknya komunitas (daerah atau kota) tentulah dilandasi oleh sejumlah nilai yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Bahwa menelusuri alur konteks kejadian paling yang terekam dalam sejarah, yang ada relevansinya dengan keberadaan komunitas menjadi dasar yang penting untuk menentukan hari jadi pada suatu komunitas;
- 4) Bahwa makna apa yang hendak diambil dari sejarah sebagai peristiwa dan proses terbentuknya komunitas selain ditentukan oleh nilai yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, yang lebih penting adalah bahwa nilai tersebut memberikan kebanggaan dan harga diri dari keberadaan komunitas;

- 5) Bahwa dengan pendekatan masalah diatas, paling tidak ada empat model yang dapat dijadikan dasar argumentasi dan konsep, yaitu kekunoan; nilai perjuangan/pembebasan dari penjajahan; administratif/pemerintahan; dan sosio historis.

Perkataan kota dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian yang masing-masing pengertian sangat tergantung pada kontekstualnya, pengertian kota tersebut yaitu:

- 1) Dinding (tembok) yang mengelilingi benteng (tempat pertahanan), diantara kota-kota yang ada di Bangka yang memiliki benteng adalah, Tempilang, Toboali, Kota Kapur dan Mentok serta daerah lainnya.
- 2) Daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:463). Pengertian Kota Pangkalpinang dapat digolongkan pada pengertian nomor dua dan terakhir di atas.

Dalam bahasa Melayu, perkataan kota juga memiliki pengertian yang serupa dengan pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, disamping arti kata kota secara leksikografis, para ahli mengemukakan pula pengertian-pengertian tentang kota berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Sebagai contoh, John Sirjamaki seorang ahli sosiologi menyatakan, bahwa kota adalah permukiman yang permanen, relatif luas, penduduknya padat serta heterogen dan memiliki organisasi-organisasi politik, ekonomi, agama dan budaya (Sirjamaki, 1964:4-6). Dengan memadukan beberapa pendapat di atas, ahli perkotaan berbangsa Perancis, Dora Jane Hamblin mengemukakan, bahwa kota adalah tempat yang dihuni secara permanen oleh suatu kelompok yang lebih besar dari suatu komunitas. Di kota terjadi suatu pembagian kerja, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan diferensiasi fungsi, hak dan tanggung jawab.

Memang dalam berbagai definisi tentang kota tercakup unsur keluasan wilayah, kepadatan penduduk yang bersifat heterogen dan bermata pencaharian non pertanian, serta fungsi administratif-ekonomi-budaya. Unsur-unsur tersebut terwujud pula ke dalam fisik kota sehingga terbentuklah ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri tersebut kemudian sebagian tertinggal sebagai data arkeologi, sejarah, arsitektur, dan sebagian lain yang lebih besar jumlahnya musnah oleh faktor alam dan manusia. Data-data tersebut berupa artefak dalam berbagai bentuk, tata ruang. Sedangkan data non artefak yang ditinggalkan suatu kota berupa tradisi, seni dan toponim. Di Indonesia, kota-kota kuno biasanya berdiri di daerah pantai, di tepi sungai, atau di lembah-lembah dengan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana baik politik, keamanan, ekonomi, keagamaan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang lain. Tampaknya lokasi suatu kota pada zaman dahulu dipilih berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang menyangkut aspek-aspek tersebut di atas.

Mempelajari penelitian Bapak Susanto Zuhdi, Guru besar Ilmu sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, tentang proses penetapan hari-hari jadi beberapa kota di Indonesia melalui pendekatan masalah melalui 4 (empat) model yang didasarkan sebagai argumen dan konsep hari jadi suatu kota, kiranya akan dapat menjadi dasar pembandingan yang setara dalam menetapkan hari jadi Kota Pangkalpinang.

- 1) Hari jadi berdasarkan pada nilai “kekunoan” dalam penetapan hari jadi Kota Kediri di Jawa Timur, dengan berdasarkan pada Prasasti Kwak dari abad ke 9, maka hari jadi Kota Kediri pada tanggal 28 Juli tahun 886 M;
- 2) Nilai perjuangan /pembebasan dari penjajahan, melatarbelakangi hari jadi Kota Jakarta tanggal 22 Juni 1527 M. Untuk mengingatkan kejayaan pasukan fatahillah yang berhasil mengusir Portugis yang mencoba menaklukkan Sunda Kelapa pada tahun 1527;
- 3) Hari jadi Banyuwangi pada 18 Desember 1771, yakni berdasarkan Peristiwa perang Puputan Bayu;
- 4) Hari jadi berdasarkan administratif /pemerintahan, yaitu”hari jadi Sampang. Sampang merupakan pusat kerajaan Madura Bagian Barat, tempat penobatan Raden Praseno sebagai Raja oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo dari Mataram pada 12 Rabiul awal bertepatan dengan tanggal 12 Desember 1624 M. Bahwa yang hendak diangkat adalah untuk memotivasi masyarakat sekarang untuk mewujudkan kejayaan lebih dari apa yang sudah dicapai di masa lalu;
- 5) Sosio historis kreteria yang hendak diterapkan pada model keempat ini adalah suatu proses terbentuknya masyarakat secara sosiologis historis dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu sehingga membentuk struktur tertentu dalam rentang waktu tertentu. Model ini dipandang lebih objektif karena merupakan proses”administrasi” dalam arti perkembangan suatu masyarakat tertentu. Akan tetapi secara objektif apapun bukan berarti harus kehilangan makna. Justru makna itu diperoleh melalui pemberian interpretasi yang kontekstual dengan karakteristik yang di perlihatkannya.

## **2. Tinjauan Hari Jadi Kota Pangkalpinang**

### **a. Beberapa Peristiwa Penting berkenaan dengan sejarah hari lahir Kota Pangkalpinang**

Secara etimologis Pangkalpinang berasal dari kata pangkal atau pengkal dan Pinang (*areca chatecu*). Pangkal atau pengkal yang dalam bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal, atau dapat diartikan pada awal mulanya sebagai pusat pengumpulan Timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu (wangkang) dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai. Sebagai pusat segala aktifitas, sebutan Pangkal atau Pengkal juga digunakan oleh orang Bangka masa lalu untuk penyebutan daerah-daerah seperti Pangkal Bulu, Pangkal Raya, Pangkal Menduk, Pangkal Mangas, Pangkal Lihat yang kemudian menjadi Sungai Lihat atau Sungailiat sekarang. Sedangkan Pinang (*areca chatecu*) adalah nama sejenis tumbuhan Palm yang multi fungsi dan banyak tumbuh di Pulau Bangka.

Pusat pemukiman awal Pangkalpinang dibangun ditepi Sungai yang membelah Kota Pangkalpinang. Proses pembentukan Pangkalpinang menjadi sebuah kota seperti sekarang sangatlah panjang dan berakar, dimulai dari ditemukannya biji timah yang terkandung hampir di seluruh pelosok Pulau Bangka, sampai upaya eksploitasi timah dan hasil bumi Pulau Bangka seperti Lada Putih, Karet dan Damar oleh berbagai bangsa. Pembentukan Pangkalpinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (memerintah pada tahun 1758-1776) kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin-batin, baik Batin Pesirah maupun Batin Pengandang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari Pangkal atau Pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja-pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Siam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Palembang Darussalam. Diantara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang yang kita kenal sekarang. Setelah pendirian pangkal atau pengkal lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirimkan Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas di masing-masing pangkal atau pengkal. Pembentukan Pangkalpinang menjadi sebuah Kademangan diperkirakan pada tanggal 7 Rabiulawal tahun 1186 H atau tanggal 27 April 1766 M, bersamaan dengan penetapan kademangan Pangkal Lihat yang kemudian menjadi Sungailiat.

Struktur tata ruang Pangkalpinang pada awalnya hanyalah sebuah pangkal atau pengkal pengumpul timah dengan parit-parit timahnya dan pemukiman di sekitar Sungai Rangkuai dan Sungai Pedindang yang membelah Kota Pangkalpinang. Bekas-bekas parit atau tambang timah tersebut masih dapat kita lihat pada bekas galian yang oleh orang Bangka disebut dengan Kolong. Di Pangkalpinang yang masih tersisa diantaranya adalah Kolong Kepuh (karena airnya kepuh), Kolong Ijau (karena airnya berwarna hijau), Kolong Bacang I dan Kolong Bacang II, Kolong Sampur, Kolong Bukit Intan, Kolong Tambang 12 (parit 12), Parit 24, Kolong Kelemen atau Kolong Bilun, Kolong Pedindang, Kolong Nangka I dan Kolong Nangka II, Kolong Teluk Bayur, Kolong Bintang, Kolong Pasar Ikan atau Gudang Padi, Kolong Kacang Pedang, Parit 6, Parit 42 (Si Luk), Nai Si Fuk, Sung Sa Tie, Yung Fo Hin dan Parit Lalang. Pangkalpinang kemudian lambat laun terus berubah dan berkembang dengan pesat seiring dengan perjalanan sejarah dan aktifitas kehidupan masyarakatnya menjadi kampung besar, terbukti pada tahun 1848 jumlah penduduk Pangkalpinang berjumlah sekitar 6.694 orang, yang tinggal tersebar di 105 kampung. Secara konsentri keberadaan tempat tinggal masyarakat Pangkalpinang pada awalnya mengacu pada parit atau tambang timah dan keberadaan sungai-sungai yang membelah Kota Pangkalpinang sebagai sarana kehidupan pada waktu itu. Keberadaan tempat tinggal masyarakat kemudian terkonsentrasi pula di kiri kanan jalan, karena proses pembentukan oleh kolonial Belanda, selanjutnya ada yang terkonsentrasi di sekitar keresidenan sebagai pusat pemerintahan (bestuur) dan di kawasan-kawasan tertentu di pusat perdagangan (pasar atau keramaian). Dengan demikian, tata letak kampung-kampung tersebut kemudian menyebar sesuai dengan pusat-pusat konsentri di atas, yaitu ada yang di sekitar rumah residen, disekitar pasar dan pusat keramaian, di kiri kanan jalan, disekitar parit atau tambang, dan disekitar sungai.

Keberadaan kampung-kampung tersebut berkembang dan berproses sesuai dinamika perkembangan masyarakat dan budayanya. Namun demikian dinamika perkembangan dan perubahan tersebut masih tetap berpijak pada akar budaya masyarakat setempat.

Beberapa Peristiwa Penting yang dapat dijadikan alternatif hari lahir Kota Pangkalpinang:

No	Tokoh Penting	Masa /periode /tahun	Peristiwa penting
1	Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Ahmad Najamuddin Adi Kesumo	1758-1776	<u>Pangkalpinang sudah menjadi sebuah Kademangan (tanggal 7 Rabiulawal tahun 1186 H atau tanggal 27 April 1766 M)</u> dan pusat segala aktifitas kegiatan dan pemukiman. Pada masa itu rakyat mengalami masa kejayaan dan kemakmuran karena diberi kebebasan untuk menambang timah secara tradisional dan menjualnya kepada Sultan Palembang. Untuk mengikat rakyat yang menambang timah dibuat aturan yaitu setiap Penambang harus membayar konsesi berupa Timah Tiban setiap tahunnya kepada Sultan Palembang sebagai pajak (seberat sekitar 31 kg), kemudian sebagai balas jasa pembayaran Timah Tiban, Sultan Palembang memberikan selebar baju hitam dan cukin kepada masyarakat. Dari hasil pajak yang disebut TIBAN – TUKON dan adat perdagangan serah yaitu hak monopoli dagang yang dimiliki Sultan Palembang atas penjualan beberapa jenis barang dengan harga yang telah ditentukan seperti besi, bahan pakaian kasar dan garam, Kesultanan Palembang Darussalam memperoleh sumber keuangannya di samping diperoleh juga dari monopoli terhadap perdagangan lada dan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.
2	Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Badaruddin	1776-1803	Pada tahun 1770 mulai mendatangkan pekerja-pekerja dari Cina untuk menambang Timah guna meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka, sejak itu mulailah berdatangan orang-orang Cina dari Siam, Malaka, Malaysia dan dari Cina Selatan ke Pulau Bangka. Kebanyakan mereka berasal dari suku Hakka (Khek) dari Propinsi Guang Xi. Pekerja-pekerja Cina yang miskin ini sengaja di kontrak untuk menjadi kuli di tambang-tambang timah (parit) di Pulau Bangka untuk jangka waktu tertentu, termasuk untuk bekerja di parit-parit penambangan timah di Pangkalpinang (mereka oleh orang Bangka sering disebut Singkek Parit).
3	J. Van Den Bogaart	1803	Seorang pegawai Pemerintah Kolonial Belanda mengunjungi Bangka dan mendiskripsikan bahwa ada empat kelompok atau group masyarakat yang mendiami Pulau Bangka pada waktu itu yaitu, orang-orang Cina, orang Melayu termasuk di dalamnya etnis lain dari berbagai pulau di Nusantara, Hill People sering disebut orang gunung, atau orang darat sekarang masih tersisa disekitar Gunung Maras yang disebut komunitas adat masyarakat Mapur dan Sea Dwellers disebut orang laut seperti komunitas masyarakat Sekak yang masih tersisa di Kedimpel, Tanjunggunung dan Jebu.

4	VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)	1642	Antara Palembang dan Batavia terjadi ikatan perjanjian perdagangan lada pada tahun 1642 kemudian ikatan tersebut mengalami perluasan di bidang perdagangan timah pada tahun 1710).
5	Rollo Gillespie	1812	Inggris ingin menguasai biji timah dan jalur perniagaannya, bahkan Inggris sempat merubah nama Pulau Bangka dengan sebutan Duke of Yorks Island pada tanggal 20 Mei 1812.
6	Gubernur Jenderal Raffles	1812	Meminta Sultan Mahmud Badaruddin II menyerahkan loji Sungai Aur dan penguasaan sepenuhnya atas penambangan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, akan tetapi permintaan ini ditolak oleh Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II dengan alasan bahwa daerah-daerah tersebut telah dikuasai oleh Kesultanan Palembang sebelum kedatangan Inggris Gubernur Jenderal Raffles kemudian mengirim Kolonel Rollo Gillespie ke Palembang yang berangkat dari Batavia pada tanggal 20 Maret 1812. Sebulan kemudian pasukan ini mendarat di muara Sungai Musi dan kemudian berhasil menaklukkan Palembang pada akhir bulan April tahun 1812, selanjutnya pasukan Inggris menguasai Mentok pada tanggal 18 Mei 1812.
7	Meares	16 September 1812	Pemerintah Inggris mengangkat Meares sebagai Residen, dalam upaya menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II, Residen Meares tertembak di Bailangu dan meninggal di Mentok pada tanggal 16 September 1812. Ketika Inggris berkuasa di Pulau Bangka, Inggris (dalam hal ini kongsi dagangnya East India Company) menjadikan Pangkalpinang sebagai salah satu distrik dari tujuh distrik eksplorasi dan penghasil timah di Pulau Bangka yang produktif di samping Distrik Jebus, Distrik Klabat, Distrik Sungailiat, Distrik Merawang, Distrik Toboali dan Distrik Belinyu.
8	Perjanjian London	13 Agustus 1814	Setelah Perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan ketika Kesultanan Palembang berserta daerah-daerah lainnya termasuk Pulau Bangka diserahkan pemerintah Inggris kepada Kerajaan Belanda sebagai ganti Cotchin di India, oleh Pemerintah Hindia Belanda, Pangkalpinang dijadikan sebagai salah satu distrik penghasil biji timah yang produktif. Sebagai satu distrik, Pangkalpinang dipimpin seorang Administrateur Distrik (sering disebut masyarakat dengan sebutan Tuan Kongsi) yang merangkap sebagai kepala pemerintahan sipil distrik. Sejak itu Pangkalpinang mulai berkembang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan pertambangan. Lambat laun kampung kecil Pangkalpinang yang pada awal mula terbentuknya hanyalah berupa pangkalan (parit) pengumpul timah, daerahnya berawa-rawa dan dibelah oleh sungai-sungai (diantaranya Sungai Rangkui, Sungai Pedindang), sungai-sungai tersebut dapat dilalui oleh wangkang atau kapal-kapal kecil hingga ke muara berkembang dengan pesat.

			Pangkalpinang terus tumbuh dan berkembang menjadi kampung besar, terbukti pada tahun 1848 jumlah penduduk Pangkalpinang berjumlah sekitar 6.694 orang, yang tinggal tersebar di 105 kampung.
9	M. H. Court dan K. Heynes	10 Desember 1816	Belanda kembali menguasai Pulau Bangka dan daerah-daerah yang pernah dikuasai Inggris didasari atas Traktat (konvensi) London, pada tanggal 13 Agustus 1814. Seluruh proses serah terima daerah kekuasaan antara Inggris dan Belanda berdasarkan perjanjian atau Traktat London dilakukan antara M. H. Court sebagai perwakilan Inggris dengan K. Heynes yang mewakili Kerajaan Belanda. Serah terima dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1816 di Mentok. K. Heynes kemudian diangkat sebagai Residen Bangka yang pertama, Residen K. Heynes kemudian karena bermasalah dalam pengelolaan keuangan pertimahan, jabatannya langsung dicopot dan kekuasaannya sebagai residen diambil alih langsung oleh Edelher Herman Warner Muntinghe, Comissaris General Belanda. Edelher Herman Warner Muntinghe mendarat di Mentok pada tanggal 20 April 1818. Edelher Herman Warner Muntinghe adalah orang yang menyulut Perang Menteng atau Perang Palembang pada tahun 1819 dan kemudian beliau menghapuskan Kesultanan Palembang Darussalam.
10	M.A.P Smissaert	14 November 1819	M.A.P Smissaert diangkat sebagai Residen Bangka menggantikan Edelher Herman Warner Muntinghe, tidak lama kemudian M.A.P Smissaert terbunuh pada tanggal 14 November 1819 di Sungai Buku perbatasan antara Desa Zed dengan Desa Puding, pada waktu perjalanan pulang (inspeksi) dari Pangkalpinang menuju Mentok. Kepala M.A.P Smissaert dipenggal dan dikeringkan kemudian dikirim kepada Sultan Palembang sebagai tanda bukti kesungguhan masyarakat Pulau Bangka berperang melawan Belanda dan dengan harapan Sultan Palembang memberikan bantuan kepada rakyat Pulau Bangka. Jabatan Residen Bangka setelah kematian M.A.P Smissaert kemudian dirangkap oleh komandan militer pasukan Belanda yaitu Letkol Keer.
11	Depati Bahrin	1820-1828	Depati Bahrin adalah putera Depati Karim atau Depati Anggur. Bahrin diangkat oleh Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II (memerintah pada tahun 1804-1852) sebagai Depati di Pulau Bangka. Karena kecerdikan dan kepandaiannya mengatur siasat dan strategi perang ia digelari oleh pasukan Belanda sebagai Napoleon dari Pulau Bangka. Untuk mengatasi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Depati Bahrin, Pemerintah Hindia Belanda harus mendatangkan kesatuan Kaveleri dari legiun Perang Wedono dan kesatuan infanteri di bawah pimpinan Kapten Du Perron, kemudian Belanda terpaksa harus melakukan berbagai perundingan dengan Depati.

12	Admiral Constantijn Johan Walterbeek	1819	Untuk menumpas perlawanan-perlawanan Rakyat, Belanda menjadikan Pangkalpinang sebagai basis pertahanan dan pusat kekuatan pasukannya. Sebagai bukti bahwa Pangkalpinang sebagai pusat pada bulan September tahun 1819. Untuk kedua kalinya pada waktu itu Bangkakota diserang oleh pasukan Belanda dari darat yang dipimpin oleh Kapten Laemlin yang membawa pasukannya dari Pangkalpinang dan memulai serangan pada tanggal 14 September 1819 (serangan pertama Belanda terhadap Bangkakota pada tanggal 17 Agustus 1819 dilakukan melalui laut dipimpin oleh Kapten Ege), sedangkan serangan dari laut dilakukan oleh pasukan Belanda dengan empat buah kapal perang di bawah pimpinan Kapten Baker. Kemudian untuk menumpas perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Depati Bahrin pada tahun 1820–1828 dan untuk mempertahankan Pulau Bangka, pada tahun 1819 Admiral Constantijn Johan Walterbeek mengirim 100 orang infanteri ke Pangkalpinang di bawah pimpinan Kapten Ege. Pasukan ini juga difungsikan sebagai cadangan karena pada waktu itu sedang berlangsung Perang Palembang, kemudian selanjutnya pada bulan Maret tahun 1820 Letnan Reisz melancarkan serangan dengan membawa pasukan dari Pangkalpinang untuk menaklukkan Kota Beringin.
13	Depati Amir	1848-1851	Pasukan Belanda menghadapi perlawanan rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir dan saudaranya Hamzah pada tahun 1848-1851. Perjuangan yang dipimpin oleh Depati Amir adalah perjuangan berskala nasional, untuk menghadapi perlawanannya, Pemerintah Hindia Belanda mengerahkan sekitar 245 Perwira dan Bintara bangsa Eropa serta 339 bintara orang Indonesia beserta anak buahnya disamping Polisi. Untuk menghadapi perlawanan para pejuang Bangka, Belanda harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kemudian cara-cara yang licik dan keji juga dilakukan Belanda untuk menangkap Depati Amir dan pengikutnya seperti upaya penangkapan yang gagal oleh militer Belanda dipimpin oleh Letnan Campbell, Administratur Pangkalpinang De Bley dibantu oleh Jaksa Arifin di rumah Demang Abdurrasyid yang terletak di Jalan Ahmad Yani, berdekatan dengan Sungai Rangkui (di depan rumah Haji Aziz Mahmud sekarang).
14	A.J.N. Engelenberg	1913-1918	- <u>Pangkalpinang menjadi pusat administrasi negeri (bestuur). Serah terima jabatan Residen Bangka dilaksanakan di Mentok pada tanggal 3 September 1913</u> antara residen yang lama Boers kepada residen yang baru A.J.N. Engelenberg, pada masa ini dibangun kantor keresidenan (bekas kantor sementara Gubernur), gedung pertemuan (Panti Wangka sekarang), kantor polisi (Opas), penjara dan sarana-sarana lainnya seperti alun-alun (Lapangan Merdeka), jalan raya, rumah untuk karyawan BTW dan dibangun pula taman yang disebut Wilhelmina Park (sekarang Tamansari).

			<p>- Pada tahun 1916 Residen A.J.N. Engelenberg membentuk sebuah komisi berdasarkan keputusan Nomor 200 tanggal 17 Juni 1916 yang beranggotakan 6 (enam) orang Demang yaitu, Raden Achmad, Demang Terbeschikking; Raden Moehammad Umar, Demang Mentok; Abdul Hamid, Demang Koba; Mangaraja Enda, Demang Merawang; Abang Moehammad, Demang Pangkalpinang dan Abang Abdul Rasjid, Demang Jebus. Komisi ini bertugas untuk mendirikan Gemeente di tiap-tiap kampung dengan tujuan agar masing-masing kampung di Bangka yang merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum (volkgemeenschappen) memiliki hak adat istiadat dan asal usul yang tidak bertentangan dengan Undang-undang (ordonansi) Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Inlandshe Gemeente Ordonantie dan Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten, keberadaan Gemeente kemudian diakui sah oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu terdapat sekitar 163 Gemeente di Pulau Bangka termasuk di Pangkalpinang yaitu Gemeente Gabek dan Gemeente Pangkalpinang. Pengaturan ini bertahan cukup lama dan baru diganti dengan terbitnya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.</p>
15	Doornik, W	1918-1923	<p>Pada masa ini dibangunlah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti pada tahun 1920 dibangun balai pengobatan bagi karyawan BTW (sekarang Rumah Sakit Bakti Timah). Selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1920 mendirikan sekolah HCS (SMP Negeri 1), kemudian pada tahun 1923, Pemerintah Hindia Belanda membangun pusat peleburan biji timah dengan menggunakan oven pendingin air di Pangkalpinang sebelum balok-balok timah dikirim ke Singapura.</p>
16	Fraser, JJ	1923-1925	<p>Di Pangkalpinang dibentuk NV. MEBY (Maatschappij tot Exploitatie van Bioscopen en Ys fabrieken).</p>
17	J.E Edie	1925-1928	<p>Penelitian untuk mencari sumber air baku bersih untuk masyarakat Pangkalpinang dan pembangunannya direalisasikan pada tahun 1927 dengan membangun fasilitas air minum di Bukit Mangkol. Untuk melayani kebutuhan 11.970 orang pelanggan penduduk Pangkalpinang. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda membangun Gedung Gereja Maranatha Pangkalpinang yang memiliki ciri khas yang unik dan menarik karena terdapat menara jam yang besar serta dibangun bersama pastorinya (rumah pendeta). Bangunan ini terletak di areal tanah seluas 1.567 m<sup>2</sup> dan dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1927 dengan nama Kerkeraad Der Protestansche Gemeente to Pangkalpinang.</p>

18	Haze Winkelman WD	1928	Memerintah selama tiga bulan.
19	Hooyer, DG	1928-1931	Masyarakat Tuatunu mulai mendirikan Masjid Al Mukarrom pada tahun 1928.
20	Starhamer, HM	1931-1934	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada masa Residen Starhamer, HM, atas dasar ordonansi tanggal 2 Desember 1933, Stbl.Nomor 565, terhitung dari tanggal 11 Maret 1933 terbentuklah "<i>Residentie Bangka en Onderhoregheden</i>" yang menetapkan Pulau Belitung berikut pulau-pulau lain sekitarnya menjadi "<i>Onderafdeling</i>" yang dikepalai Asisten Residen, Kota Pangkalpinang tetap sebagai Ibukota Keresidenan Bangka Belitung. Pulau Bangka sendiri terbagi atas 5 <i>Onderafdeling</i> yang kemudian pada perkembangan selanjutnya menjadi Kewedanan..</li> <li>- Perusahaan Post, Telegraaf en Telefoondienst (PTT) yang didirikan pada tahun 1884 dengan nama Post en Telegraafdienst ditetapkan sebagai perusahaan negara.</li> </ul>
21	Mann, CJ	1934-1942	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan besar pada agama Katolik di Pangkalpinang, yaitu pada tanggal 24 Mei 1931, para Pastor agama Katolik mulai pindah dari Sambong ke Pangkalpinang untuk menempati Kapel sementara (letaknya sekarang di kompleks SD Budi Mulia). Pada mulanya pusat misi gereja di Pulau Bangka berawal di Sungai Selan pada tahun 1853 kemudian di pindahkan ke Sambong (sekitar 8 km dari Pangkalpinang) dan selanjutnya pada tahun 1913 dipindahkan ke Pangkalpinang. Sebelum menjadi pusat misi gereja Katolik, Pangkalpinang sejak tahun 1863 merupakan Stasi dari Sungai Selan dan mempunyai sebuah Kapel yang bernama Santo Yoseph.</li> <li>- Mulai dibangun kompleks perkuburan Cina Sentosa Pangkalpinang pada tahun 1935</li> <li>- Kemudian masyarakat Tuatunu yang pindah ke Kampung Dalam Pangkalpinang mendirikan sebuah masjid yang kemudian diberi nama Masjid Jamik, pada tanggal 3 Syawal 1355 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1936 (masyarakat asli yang tinggal di Kampung Dalam Pangkalpinang asalnya adalah penduduk Kampung Dalam Tuatunu yang pindah karena adanya konflik atau perbedaan paham keagamaan atau masalah khilafiyah).</li> <li>- Masyarakat Pangkalpinang yang tinggal di sekitar Gabek Pangkalpinang, pada tahun 1940, juga mulai merehab Surau Assa'adah.</li> </ul>
22	P. Brouwer	1942	Bangka diduduki tentara Jepang.
23	Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hassan	1945	Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia adalah meliputi seluruh wilayah bekas Jajahan Hindia Belanda.

			<p>Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembentukan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah dan membagi wilayah Republik Indonesia atas 8 Propinsi dan Pulau Bangka termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera. Pada Tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom ke masing-masing keresidenan dan kemudian terbentuklah pemerintah daerah otonom termasuk di Keresidenan Bangka Belitung. Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946, mengeluarkan Keputusan Nomor 103. Diantara Kota-kota yang telah ditunjuk sebagai kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam lingkungan Sumatera Selatan adalah Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-Kota Tanjungkarang-Telukbetung, Bengkulu dan Pangkalpinang (sebagai Kota B). Dalam ketetapan tersebut ditentukan selanjutnya, bahwa Dewan Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh Gubernur, sedangkan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan. Ketetapan tersebut diperkuat kemudian dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 8 yang menetapkan, bahwa buat sementara yang merupakan daerah berotonomi ialah keresidenan beserta kota kota dan kabupaten yang telah dibentuk.</p>
24	R. Soemardjo	22 April 1950	<p>Pulau Bangka ditetapkan menjadi kabupaten yang terdiri atas 5 kewedanaan dan 13 kecamatan. Kewedanaan tersebut meliputi Bangka Utara yang beribukota di Belinyu, Kewedanaan Sungailiat yang beribukota di Sungailiat, Kewedanaan Bangka Tengah beribukota di Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Barat beribukota di Mentok dan Kewedanaan Bangka Selatan beribukota di Toboali.</p>
25	Raden Supardi Suwarjo, Walikota pertama Kota Kecil Pangkalpinang	1956	<p>Kota Pangkalpinang kemudian terus berkembang menjadi kota kecil yang membentuk suatu pemerintahan kota pada tahun 1956 dengan dasar pembentukan, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 <u>tanggal 14 November 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.</u> Pada waktu itu kota hanya memiliki luas 31,7 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah sekitar 50.000 orang, terdiri atas dua Gemeente yaitu Gemeente Pangkalpinang dan Gemeente Gabek.</p>
26	Raden Abdullah	1956-1958	<p>- Untuk perkantoran daerah otonom Kota Kecil Pangkalpinang sebagian berkantor di Jalan Garuda depan Firma A. Aziz Machmud, serta sebagian lagi di Jalan Balai dan di favilliun rumah dinas Walikota sekarang di Jalan Merdeka.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1958 melalui Surat Keputusan Mendikbud, Nomor 24/SK/b.III/1958, tanggal 1 September 1958 didirikan SMA sebagai cikal bakal SMA Negeri 1 Pangkalpinang. Pada awalnya nama sekolah ini yaitu SMA Negeri 139 Pangkalpinang dengan Kepala Sekolah pertama bernama Siahaan.</li> </ul>
27	Raden Hundani	1958-1960	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota pertama yang dipilih oleh DPRD Kotapraja hasil Pemilihan Umum pertama tahun 1955.</li> <li>- Pada tanggal 1 Juni 1960, manajemen AJB Bumiputera 1912 mendirikan kantor Bumiputera 1912 di Pangkalpinang, kantor beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 A Pangkalpinang</li> </ul>
28	M. Saleh Zainuddin	1960-1967	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1961 didirikan SMEA Pangkalpinang, pada waktu berdiri sekolah ini memiliki satu jurusan yaitu jurusan koperasi.</li> <li>- Bank Negara Indonesia Cabang Pangkalpinang mulai berdiri pada tahun 1965 dan diresmikan pada tanggal 20 Oktober 1965, pertama sekali berkantor di Jalan Pasar Ikan lama.</li> <li>- Wilayah pemerintahan yang semula terdiri atas 6 blok ditambah sehingga menjadi 12 blok yakni masing - masing 6 blok berada pada tiap Wilayah Keasistenan Wedana Kota. Blok I sampai Blok VI berada dalam wilayah keasistenan Kota Pangkalpinang I kemudian Blok VII sampai Blok XII berada dalam wilayah keasistenan Kota Pangkalpinang II.</li> </ul>
29	Drs. Rustam Effendi	1967-1972	Pada tahun 1970 dibangunlah kompleks Pasar Pagi yang terletak di Jalan Batin Tikal.
30	H. Masdan, SH Care Taker Walikota Kotapraja Pangkalpinang	1972-1973	Pada saat ini, sampai bulan Mei tahun 1971 Ibukota Kabupaten Bangka masih berada di Pangkalpinang hingga keluar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971 tanggal 19 Februari 1971 yang menetapkan Kota Sungailiat sebagai Ibukota Kabupaten Bangka dan peresmiannya dilakukan langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 13 Mei 1971 di Sungailiat.
31	Roesli Romli Walikotamadya Pangkalpinang	1972-1978	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975, tanggal 20 Oktober 1975.</li> <li>- Pada tanggal 7 April 1977 diresmikan pula penggunaan Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud.</li> </ul>
32	H. Mohammad Arub, SH Walikotamadya Pangkalpinang	Menjabat selama dua periode yaitu periode pertama pemerintahan tahun 1978-1983 dan periode kedua pemerintahan tahun 1983-1988,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan dana APBN mulailah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkalpinang yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta.</li> <li>- STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Pertiba didirikan pada tanggal 25 Oktober 1982. STIE ini di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang. Pada tanggal 16 Juni 1991 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984, wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang diperluas dari 31,70 km<sup>2</sup> menjadi 89,4 km<sup>2</sup>.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah pemerintahan juga ditata ulang dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan, 55 kelurahan dan 3 desa yakni Kecamatan Pangkalbalam dengan 13 kelurahan, Kecamatan Tamansari dengan 21 kelurahan ditambah satu desa dari perluasan wilayah, yakni Desa Tuatunu, Kecamatan Rangkui dengan 13 kelurahan dan Kecamatan Bukit Intan dengan 8 kelurahan dan 2 desa dari perluasan wilayah, yakni Desa Bacang dan Desa Air Itam. Dengan perubahan ini maka Kota Pangkalpinang secara astronomis berada pada garis 106°4' sampai dengan 106°7' bujur timur dan garis 2°4' sampai dengan 2°4' lintang selatan.</li> <li>- Pada minggu kedua bulan Januari 1986 terjadi banjir besar di Kota Pangkalpinang. Banjir terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi disertai dengan pasang naik air laut. Daerah yang terkena banjir hampir meliputi sepertiga Kota Pangkalpinang, meliputi cekungan antara Lapangan Merdeka ke tanjakan simpang empat Jalan Masjid Jamik beserta kawasan timur dan baratnya, Kelurahan Bintang Dalam, DAS (Daerah Aliran Sungai) Linggarjati, kiri kanan Lembawai, Trem Seberang, sebagian Pasir Putih dan Parit Lalang, wilayah-wilayah di atas berada di Kecamatan Rangkui, Pangkalbalam dan Tamansari.</li> </ul>
33	H. Rosman Djohan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang	1988-1993	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMP Negeri 9 diresmikan pada tanggal 30 Juni 1990 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. DR. Fuad Hasan.</li> <li>- Pada tahun 1991 berdiri pula SMA Negeri 3 Pangkalpinang.</li> <li>- Bank Central Asia diresmikan pada tanggal 29 Januari 1992 yang terletak di Jalan Masjid Jamik. Bank Central Asia berdiri di Pangkalpinang pada tanggal 21 Februari 1988 dan menempati 2 petak ruko berlantai 3 di Jalan Pegadaian.</li> </ul>
34	Drs. H. Sofyan Rebuin, MM Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang	Menjabat selama dua periode yaitu, periode pertama memerintah tahun 1993 - 1998 dan periode kedua memerintah tahun 1998 - 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada periode pertama kepemimpinan beliau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.1.2436, tanggal 7 Juni 1994 berdirilah Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan program studi DIII Keperawatan.</li> <li>- Menjelang masa akhir pemerintahan Drs. H. Sofyan Rebuin, MM sebagai Walikota Pangkalpinang, tepatnya pada pertengahan bulan Februari tahun 2002 dimulailah pembangunan konstruksi Plaza Pangkalpinang oleh PT MAP (PT Megatama Asia Pasific).</li> </ul>
35	Drs. H. Zulkarnain Karim, MM Walikota Pangkalpinang berpasangan dengan H. Tri Atmadja sebagai Wakil Walikota Pangkalpinang	2003-2008	Baca buku Drs. H. Zulkarnain Karim, MM Pancawarsa Membawa Perubahan Kota Pangkalpinang

36	Drs. H. Zulkarnain Karim, MM Walikota Pangkalpinang berpasangan dengan Drs. H. Malikul Amjad sebagai Wakil Walikota Pangkalpinang.	2008-2013	Baca buku Membangun Pangkalpinang Kita Untuk Semua

## b. Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang

Untuk menetapkan Hari jadi Kota Pangkalpinang dari pendekatan “Kekunoan” dan nilai perjuangan /pembebasan dari penjajahan sebagaimana kriteria yang diungkapkan diatas, barangkali tidak mungkin untuk menetapkan hari jadi Kota Pangkalpinang dari model pertama dan kedua, karena tidak adanya prasasti atau catatan sejarah yang bisa dijadikan rujukan. Untuk itu, pertanyaannya bagaimanakah menetapkan hari jadi Kota Pangkalpinang.

- 1) Menetapkan hari jadi berdasarkan model ketiga, yaitu dari pendekatan administratif /pemerintahan, sudah pernah ditetapkan sebelumnya yaitu tanggal 14 Nopember 1956, berdasarkan sejarah pemindahan kota kecil dari Mentok ke Pangkalpinang. Sementara sejarah pemerintahan yang lebih tua dari kepindahan kota kecil yaitu pemindahan ibukota Residen dari Mentok ke Pangkalpinang yang terjadi pada tahun 1913 jauh lebih relevan;
- 2) Penetapan hari jadi berdasarkan model ketiga ini, sangat menafikan sejarah peradaban yang tumbuh berkembang di Kota Pangkalpinang yang nyatanya dari catatan sejarah jauh lebih tua dari sejarah Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
- 3) Pendekatan sosio historis adalah pendekatan yang lebih ideal dan bermakna, karena yang hendak kita temukan adalah lahirnya peradaban dan kebudayaan dari suatu komunitas yang menjadi cikal-bakal Kota Pangkalpinang. Dalam sejarah masa lalunya banyak melahirkan fenomena yang menunjukkan dinamika kehidupan di Kota Pangkalpinang, yang mendorong pesatnya pertumbuhan fisik kota jauh lebih cepat dari kota-kota lainnya di Pulau Bangka.

Penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang dalam pendekatan socio-historis:

- 1) Pulau Bangka di zaman Kerajaan Sriwijaya tidak banyak yang dapat diketahui dan ceritanya hanya berawal ada berdasarkan cerita dari mulut ke mulut orang-orang tua yang mengetahui sejarah Kota Pangkalpinang. Karena sedikitnya catatan-catatan yang ada, dimana jauh sebelumnya orang-orang barat datang ke pulau Bangka. Orang-orang Hindu sudah terlebih dahulu mendatangi pulau ini. Hal ini dapat diketahui dengan penemuan Prasasti Kota Kapur pada tahun 1942 Masehi oleh J.K.Van Der Meulen. Prasasti Kota Kapur ini menyatakan bahwa Sriwijaya pada abad ke VII sudah berkuasa di Pulau Bangka pada Tahun Saka 608 atau 686 Masehi.
- 2) Pada zaman Kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi, setelah kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit, dan Pulau Bangka pun menjadi daerah kekuasaan Majapahit.

- 3) Kekuasaan Majapahit atas Pulau Bangka ditandai dengan diutusnya Patih Gajah Mada dengan seorang nahkoda keturunan arab yang bernama Sulaiman, untuk memeriksa keadaan rakyat serta tanah di Pulau Bangka. Selama Patih Gajah Mada bersama Sulaiman berada di Pulau Bangka mereka telah mengatur adat istiadat dan pemerintahan sendiri, serta memberi nama beberapa tempat di pulau Bangka diantaranya Kampung Panji di Kecamatan Belinyu sekarang. Patih Gajah Mada juga mengangkat kepala-kepala kampung serta memberikan piagam Lontar kepada tiap-tiap kepala kampung sebagai tanda pengangkatannya.
- 4) Zaman kekuasaan Johor, pulau Bangka dikuasai oleh Kesultanan Johor, ketika Sultan Johor mengangkat Panglima Sarah di Pulau Bangka yang berkedudukan di Bangka Kota. Panglima Sarah memegang kekuasaan sebagai Raja Muda di Pulau Bangka yang mengatur pemerintahan dan mengatur adat-istiadat di Pulau Bangka, dalam pemerintahan penduduk Bangka dapat bercocok tanam dengan aman dan tentram sampai beliau wafat dan makamnya dikenal masyarakat sebagai Keramat Tuan Sarah.
- 5) Zaman kekuasaan Minangkabau, dimulai dari proses penyerahan wilayah Pulau Bangka oleh Sultan Johor kepada Raja Alam Harimau Garang yang berasal dari Minang Kabau. Karena penyerahan tersebut maka dengan sendirinya Pulau Bangka masuk dalam kekuasaan kerajaan Minangkabau. Raja Alam Harimau Garang memilih tempat kedudukan Pemerintahannya di Kota Waringin. Raja Alam Harimau Garang tidak lama memegang kekuasaan di Pulau Bangka, beliau wafat dan dimakamkan di Karang Panjang. Kekuasaan kerajaan Minangkabau berakhir setelah Patih Raksa Kuning menggantikan Raja Alam Harimau Garang dengan penunjukkan dari Raja Minangkabau. Patih Raksa. Kuning memegang kekuasaan di Pulau Bangka tidak begitu lama pula meninggal dunia, dan sejak itu pula Raja Minangkabau tidak lagi menunjuk wakilnya di Pulau Bangka.
- 6) Zaman kekuasaan Sultan Banten, diawali Sultan Banten mendapat kabar berita bahwa Pulau Bangka dikuasai oleh bajak laut. Sehubungan dengan itu kemudian Sultan Banten mengirimkan satu pasukan yang kuat dengan peralatan yang lengkap dibawah pimpinan Panglima Nusantara dan Penembahan Serpu, mereka datang untuk mengusir bajak laut dari Pulau Bangka. Banten mengirimkan suatu pasukan yang kuat serta dengan peralatan yang lengkap dibawah pimpinan Panglima Nusantara, yang diperintahkan oleh Sultan Banten untuk memimpin di Bangka Kota sampai wafatnya pada tahun 1667 M.
- 7) Zaman kekuasaan Sultan-Sultan Palembang.
  - Pada zaman Sultan Palembang **Susuhunan Abdurrahman**, yang memimpin di pulau Bangka pada tahun 1667. pada masanya keluarlah hukum adat yang dinamai dengan undang-undang Simbur Cahaya yang disusun oleh Pangeran Sida Ing Kenaian, suami dari Ratu Senuhun Binti Kiai Gede Ing Pembaiun bin Kiai Gede Ing Sura Muda atau Kiai Mas Anom Adipati Ing Sura dan Undang-undang yang mengatur wilayah. Susuhunan Abdurrahman wafat dalam usia lanjut pada tahun 1702 Masehi dan beliau dimakamkan di pekuburan Candi Walang Palembang.
  - **Sultan Muhammad Mansyur**, selah susuhunan abdurrahman wafat, dinobatkan putra beliau yang tertua bernama Muhammad Mansyur menjadi Sultan Palembang dan bergelar Sultan Muhammad Mansyur Jayalaga. Didalam keraton kesultanan Palembang timbul konflik yang masing-masing ingin berebut kekuasaan, Raden Abubakar atau yang dikenal dengan Pangeran Purbaya putra Sultan Muhammad Mansyur Jayalaga yang tertua dengan permaisurinya Ratu Pamekas telah dikhianati oleh keluarga keraton dan wafat sebelum sempat menduduki tahta kesultanan Palembang untuk menggantikan ayahandanya.

- Sultan Muhammad Mansyur Jayalaga memegang kekuasaan tidak begitu lama hanya dalam masa 8 (delapan) tahun, beliau wafat tahun 1711 M, dan dimakamkan di Pasarean Kebun Gedeh. Sesuai dengan wasiat dari Sultan Muhammad Masyur Jayalaga setelah beliau wafat dinobatkanlah adik beliau sebagai wali Raja Palembang yaitu Raden Uju yang bergelar Sultan Agung Kommarudin Sri Truna. Dalam pelayaran kembali dari Palembang ke Mentok Ibu Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama yaitu Nyai Mas Senguk wafat dan dimakamkan di Mentok di Kompleh perkuburan Benteng Kota Seribu, sekarang yang dikenal masyarakat Mentok dengan keramat Nek Nguk. Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama memegang kekuasaan di Keraton Sungai Tengkuruk, kemudian beliau menikah pula dengan putri Sultan Agung Komarudin Sri Truna yang bernama Raden Ayu Senguk atau biasa pula digelar dengan Ratu Rangdan. Dengan menikahinya Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama ini kemudian beliau dinobatkan menjadi Sultan dalam kesultanan Palembang secara penuh yaitu pada tahun 1721 M. Dan berakhir pula kekuasaan Sultan Agung Komaruddin Sri Truna, beliau dimakamkan di Pasarean Palembang Lama.
- **Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama**, pada tahun 1721 dinobatkan sebagai Sultan Palembang. Selama memegang kekuasaan banyak sekali kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya baik dalam agama Islam maupun dalam bidang pembangunan lainnya. Sultan wafat pada tahun 1756 dalam usia 64 tahun, dimakamkan di dalam Guba Tengkurap Palembang.
- **Susuhunan Ahmad Najamuddin**, setelah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama wafat, atas mufakat para pemuka keraton, dinobatkan putranya yang bernama Raden Banjar yaitu saudaranya Raden Jailani yang telah menjadi korban perebutan kekuasaan didalam kraton. Setelah diangkat menjadi sultan, raden Banjar bergelar Ahmad Najamuddin Adikesuma. Pada masa Ahmad Najamuddin Adikesuma mengangkat Abang Pahang sebagai kepala pemerintahan di Pulau Bangka menggantikan kedudukan Tuk Aji Manteri Rangga Usman dengan gelar Tumenggung Dita Manggala, beliaulah sebagai Tumenggung pertama di Pulau Bangka. Kemudian atas perintah Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusuma kepada Abang Pahang Tumenggung Dita Manggala di Mentok untuk dicarikan tempat-tempat yang dapat dijadikan Kota atau negeri dimana nantinya akan dijadikan sebagai tempat kedudukan demang-demang dan Jehan yang akan menjaga atau mengawasi parit-parit timah diseluruh Pulau Bangka. Akhirnya berdirilah kota-kota atau negeri seperti Bendul, Rambat, Biat, Bunut, Sungai Buluh, dan Tempilang. Kemudian dengan perantaraan Batin-batin berdiri pula seperti Kota Panji, Layang, Sungailiat, Oekal dan Pangkalpinang. Selanjutnya dengan perantara Depati Pakuk, berdiri pula kota atau negeri Koba, Balar dan Toboali. Sedangkan Ulin, Bangkakota, Jeruk dan Kotawaringin tetap seperti biasanya. Selama lebih kurang dua puluh tahun Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikesuma menjalankan tugasnya sebagai Sultan Palembang, beliau wafat pada tahun 1776 dan dimakamkan di Kota Besar Palembang.
- **Sultan Muhammad Bahauddin**, adalah putra Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusuma, dinobatkan sebagai Sultan Palembang pada tahun 1776 M. Sultan Muhammad Bahauddin meminang seorang Putri Bangsawan Mentok yang bernama Yang Pipah salah seorang anak dari Abang Ismail atau cucunya Abang Pahang Temenggung Dita Manggala. Pada tahun 1803 sultan Muhammag Bahauddin wafat, dimakamkan di Lemabang didalam Guba Luan Lingkungan Kuta Terawangan Palembang. Pada masa kekuasaannya, beliau telah berbuat jasa dalam memajukan baik bidang perdagangan maupun dalam bidang pertanian.

- Beliau meninggalkan zuriat atas perkawinannya dengan Mas Ayu Tenga atau Ratu Agung. Beliau memegang kekuasaan kesultanan Palembang selama lebih kurang 27 Tahun yaitu dari tahun 1776 sampai dengan tahun 1803. sebagai gantinya dinobatkan putra beliau yang bernama Raden Hasan, yang dikenal dengan Sultan Mahmud Baddarudin II.
- **Susuhunan Mahmud Badaruddin II**, Raden Hasan atau Susuhunan Mahmud Baddarudin II, setelah dinobatkan sebagai sultan Palembang, beliau meminang putri Bangsawan Mentok yang bernama Yang Masyiroh anak Abang Haji Abdullah atau cucunya Abang Ismail Tumenggung Kerta Menggala. Kemudian Yang Masyaroh setelah menjadi istri bergelar Mas Ayu Ratu Ilir. Pada hari minggu tanggal 23 Ramadhan 1246 Hijriah atau pada tanggal 13 Juni 1821 terjadilah penyerahan benteng-benteng pertahanan Palembang kepada Jendral De Kock. Dari pihak susuhunan Mahmud Baddarudin II penyerahannya diwakilkan oleh Pangeran Prabu Kesuma Hamid serta Pangeran Kramjaya Abdul Azim, sedangkan yang menerima penyerahan itu Pangeran Wira Krama Gubir sebagai wakil dari Jendral De Kock. Disamping itu atas keputusan Pemerintah Hindia Belanda Susuhunan Mahmud Baddarudin II mendapat hukuman pengasingan ke Ternate. Selama lebih kurang 31 Tahun, Susuhunan Mahmud Baddarudin II menetap di Ternate, pada hari Jum'at berkisar pukul 06.00 pagi pada 14 hari bulan Saffar 1269 Hijriah bertepatan dengan tahun Masehi tanggal 26 Nopember 1852 beliau meninggal dunia pada usia 87 tahun dan dimakamkan di Ternate.

Dalam menentukan hari jadi Kota Pangkalpinang, paling tidak pengertian dari konsep kota perlu menjadi perhatian terutama ketika kita bicara Kota Pangkalpinang. Apakah yang dimaksud "Pangkalpinang", apa yang dimaksud Pangkalpinang sebagai konsep Kota atau Pangkalpinang. Sebagai pengertian suatu wilayah pemerintahan, ruang lingkup Pangkalpinang sebagai konsep kota adalah termasuk dalam model konsep Sosilogis Historis, sedangkan yang kedua merupakan konsep Administratif dan Politik. Relative yang lebih mudah untuk penetapan daripada Kota Pangkalpinang apabila dikaitkan dengan pembentukan pemerintahan (seperti yang ada sekarang). Hal ini dapat dipahami karena pembentukan suatu wilayah administratif adalah surat keputusan (Besluit) atau suatu Akta Perjanjian. Apabila kita ingin menunjukkan dengan identitas yang membanggakan yang memiliki makna subyektif bagi suatu komunitas, sehingga dapat dijadikan alasan sekaligus semangat untuk membangun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan maka pendekatan model Sosi Historis harus kita jadikan kesepakatan dalam menentukan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

Rumusan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, diusulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari sebagian fakta sejarah diatas, maka yang lebih memenuhi persyaratan secara Sosip Historis dan tepat untuk ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pangkalpinang adalah fakta sejarah pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adikesuma, menggantikan ayah kandungnya Sultan Mahmud Baddarudin yang meninggal pada tanggal 17 September 1757 Masehi, dimana bahwa apabila sultan pada Kesultanan Palembang Darusalam mangkat maka secara langsung digantikan /penobatan /pengangkatan Sultan selanjutnya yang meneruskan masa kekuasaan /pemerintahan kesultanan.
- 2) Bahwa Masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adikesuma adalah dari tahun 1757 – 1776 Masehi.

- 3) Bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najmuddin Adikusuma inilah untuk pertama kali muncul nama Pangkalpinang, yaitu ketika Sultan Ahmad Najamuddin Adikusuma memerintahkan kepada Abang Pahang Tumenggung Dita Manggal di Mentok, untuk mencapai negeri untuk nantinya dijadikan sebagai tempat kedudukan Demang-Demang dan Jahang yang akan menjaga mengawasi parit-parit timah diseluruh pulau Bangka. Akhirnya berdirilah kota atau negeri seperti Bendul, Rambat, Biat, Bunut, Sungai Buluh, dan Tempilang Kemudian dengan perantaraan Batin-batin berdiri pula Kota Panji, Layang, Sungailiat, Oekal dan Pangkalpinang.
- 4) Bahwa kapan tepatnya peristiwa itu terjadi tidak ada dokumen sejarah yang dapat dijadikan rujukan, namun sebagai dasar untuk penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang dapat dilakukan melalui pendekatan tradisi dan sosio historis sebagai berikut:
  - a) Bahwa parit-parit timah sudah ada sejak sebelum masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adikesuma;
  - b) Bahwa luputnya Kota Pangkalpinang dalam fakta sejarah sebelumnya bukan karena belum terbangun, tetapi lebih pada masalah belum adanya prasarana khususnya jalan sebagai penghubung dengan kota pelabuhan disekitar pulau Bangka;
  - c) Bahwa masa kesultanan Ahmad Najamuddin Adikesuma, keberadaanya jelas lebih belakangan dari Kota Mentok, tetapi tidak lebih muda dari kota-kota disekitarnya dalam satu garis keterhubungan yang relative tidak dapat dikatakan sebagai kota dipinggir pantai /pelabuhan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan dasar-dasar yang dikemukakan diatas, maka diusulkan hari jadi Kota Pangkalpinang pada tahun 1757 Masehi, dengan tanggal dan bulan mengacu pada masa Sultan Ahmad Najamuddin Adikesuma pada Kesultanan Palembang, yaitu **17 September 1757 Masehi**.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIS**

### **1. Ketentuan Umum**

Beberapa istilah-istilah /pengertian yang dipakai dalam naskah akademis ini beserta arti dan maknanya, meliputi:

- a. Kota adalah Kota adalah Kota Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- c. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- h. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Pangkalpinang ;
- i. Kelurahan atau sebutan lain adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan ;
- j. Hari Jadi Kota Pangkalpinang adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kota Pangkalpinang;
- k. Naskah riwayat singkat adalah himpunan data yang diperoleh dari berbagai unsur yang telah disusun secara sistematis;
- l. Peringatan Hari Jadi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tepat pada tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

### **2. Materi**

Konsep, pendekatan dan azas-azas dari materi hukum yang diatur, serta pemikiran-pemikiran normative yang disarankan, yang merupakan materi yang hendak diatur dan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang adalah penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, mencakup:

- a. Penetapan tanggal, bulan dan tahun hari jadi Kota Pangkalpinang;
- b. Naskah riwayat singkat hari jadi Kota Pangkalpinang;
- c. Pelaksanaan peringatan hari Jadi Kota Pangkalpinang;
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.
- e. Disamping materi yang hendak diatur dimaksud, juga diatur diktum-diktum yang berkenaan dengan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan yang menjelaskan hal-hal yang menyangkut: Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan daerah baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah yang baru itu mulai berlaku; Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah yang baru. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan daerah baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah yang baru itu mulai berlaku.

## **BAB IV PENUTUP**

Naskah akademis ini tidak lain adalah sebuah dokumen perihal argumentasi mengapa Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang perlu dibuat, meskipun telah adanya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan hari jadi daerah otonom Kota Pangkalpinang. Didalamnya memuat identifikasi dan elaborasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perda ini, penjelasan atas permasalahan dan rekomendasi atau solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang kelak akan dituangkan ke dalam pasal-pasal perda.

Tentu tidak hanya karena metodologi dan rangkaian proses tertentu yang memuat dokumen ini hadir. Disamping mereka yang telah disebut diatas, banyak pihak lain yang turut serta membantu terselesainya justifikasi rasional rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ini menurut porsi dan bagiannya masing-masing. Untuk itu, Panitia Pembuatan dan Diseminasi Lambang Daerah Kota Pangkalpinang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang beserta staf sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang serta para tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang turut serta dalam Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ini.

Demikian beberapa hal yang merupakan hasil kajian berkenaan dengan Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penulisan rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang.

Semua materi yang diatur dalam satu bentuk peraturan daerah, meliputi hal-hal pokok sebagaimana materi yang merupakan muatan isi materi rancangan peraturan daerah. Sebagian yang lain sebaliknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lain, seperti: pengaturan tentang Tata tertib Rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Pangkalpinang dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pangkalpinang; partisipasi masyarakat Kota Pangkalpinang dalam memperingati hari jadi Kota Pangkalpinang.

## LAMPIRAN /DAFTAR PUSTAKA

### A. Panitia Pembuatan dan diseminasi Lambang Daerah Kota Pangkalpinang.

Lampiran : Keputusan Walikota Pangkalpinang  
Nomor :165/KEP/ORG/III/2010  
Tanggal :15 Maret 2010

- Pelindung : 1. Walikota Pangkalpinang  
2. Wakil Walikota Pkpinang  
3. Ketua DPRD Kota Pkpinang  
4. Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang  
5. Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang  
6. Dandim 0413 Bangka  
7. Kajari Pangkalpinang  
8. Kapolresta Pangkalpinang
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
- Ketua Pelaksana : Asisten Administrasi Umum Setdako.
- Wakil ketua pelaksana : 1. Asisten Adm.Pemerintahan Setdako.  
2. Asisten Adm.Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setdako.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdako.  
Wakil sekretaris : Kasubbag Kelembagaan pada Bag. Organisasi.
- Staf pelaksana teknis : 1. Kabag. Humas dan Protokol.  
2. Kepala Bagian Hukum.  
3. Kepala Bagian Perlengkapan.  
4. Sekretaris Dinas Budparpora.  
5. Kasubbag Per-UU.
- Staf administrasi : 1. Kasubbag Analisa Jabatan.  
2. Kasubbag Ketatalaksanaan.  
3. Kasubbag Pemanfaatan dan Pemeliharaan.  
4. Analis Ketatalaksanaan pada Bag. Organisasi.  
5. Analis Jabatan pada Bag. Organisasi.  
6. Pranata Komputer pada Bag.Organisasi.  
7. Analis Kelembagaan pada Bag. Organisasi.

**Kelompok kerja II (Pokja II)**  
Membidangi logo, bendera, bendera Jabatan Kepala daerah, dan hari jadi Kota Pangkalpinang.

1. Tenaga ahli (Tim Peneliti) Hari Lahir Kota Pangkalpinang. :
  1. Suhaimi Sulaiman BA
  2. Drs. Lukman Albani
  3. Arifin Mahmud
  4. K.H. Usman Fatan
  5. Farid Effendi, SH.
  
2. Narasumber seminar hari lahir dan logo Kota Pangkalpinang. :
  1. H. Nurdin Yusuf, S.Pd
  2. Willi Siswant o
  3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
  4. Drs.H. Kamaruddin, AK
  5. Kadin. Budparpora.
  
3. Tim pembahas
  - a. Tim Juri lomba Logo daerah. :
    1. Hongki Listiadi
    2. Kadin. Sosnaker
    3. Kepala Bappeda
    4. Kadin PU
    5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
  
  - b. Moderator seminar. : Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Budparpora.
  
  - c. Notulen seminar. :
    1. Fandiar, SH
    2. Lalita TD Nst, SH.
  
  - d. Pembahas seminar logo, bendera bendera jabatan kepala daerah dan hari jadi Kota Pangkalpinang. :
    1. Ketua Forum Kota Pangkalpinang.
    2. Drs. H. Sjahrum HS, MM
    3. Kepala BLH
    4. Drs. H. Anwar effendi
    5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
    6. Kabag. Administrasi Pemerintahan.

**Kelompok Kerja III  
(Pokja III)**

Membidangi Hymne Kota Pangkalpinang.

1. Tenaga ahli (tim penyusun) Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Kadin Pendidikan
  2. Drs. Hasanusi
  3. Jujur Sunaga
  4. Rusli
  5. Risma S.
  
2. Narasumber seminar Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan
  2. Staf. Ahli bidang hukum dan politik
  3. Drs. Syirkani Abdullaj
  4. Sekretaris BLH
  5. Kepala Bagian Adm.Pembangunan dan SDA.
  
3. Tim pembahas seminar Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Drs.H. Badaruddin, Usman
  2. Ketua Dewan Kesenian Kota Pangkalpinang
  3. Ibu Rasmini
  4. Kabid. Kebudayaan Disbudparpora

5. Kasi Kesenian dan Perfilman  
Disbudparpora
6. Kepala SMAN 1 Pangkalpinang
7. Kepala SMAN 2 Pangkalpinang
8. Kepala SMAN 3 Pangkalpinang
9. Kepala SMAN 4 Pangkalpinang
10. Kepala SMKN 3 Pangkalpinang.

Lampiran : Keputusan Walikota Pangkalpinang  
Nomor : 307/KEP/ORG/IV/2010  
Tanggal : 27 April 2010

- Pelindung : 1. Walikota Pangkalpinang  
2. Wakil Walikota Pkpinang  
3. Ketua DPRD Kota Pkpinang  
4. Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang  
5. Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang  
6. Dandim 0413 Bangka  
7. Kajari Pangkalpinang  
8. Kapolresta Pangkalpinang
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
- Ketua Pelaksana : Asisten Administrasi Umum Setdako.
- Wakil ketua pelaksana : 1. Asisten Adm.Pemerintahan Setdako.  
2. Asisten Adm.Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setdako.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdako.  
Wakil sekretaris : Kasubbag Kelembagaan pada Bag. Organisasi.
- Staf pelaksana teknis : 1. Sekretaris Dinas Budparpora  
2. Kepala Bagian Hukum.  
3. Kepala Bagian Perlengkapan.  
4. Kepala Bagian Umum  
5. Kepala sub bagian Perundang-Undangan.
- Staf administrasi : 1. Kasubbag Analisa Jabatan.  
2. Kasubbag Ketatalaksanaan.  
3. Kasubbag Pemanfaatan dan Pemeliharaan.  
4. Analis Ketatalaksanaan pada Bag. Organisasi.  
5. Analis Jabatan pada Bag. Organisasi.  
6. Pranata Komputer pada Bag.Organisasi.  
7. Analis Kelembagaan pada Bag. Organisasi.

**Kelompok kerja II  
(Pokja II)**

Membidangi logo,  
bendera, bendera  
Jabatan Kepala daerah,  
dan hari jadi Kota  
Pangkalpinang.

1. Tenaga ahli (Tim Peneliti) Hari Lahir Kota Pangkalpinang. :
  1. Suhaimi Sulaiman BA
  2. Drs. Lukman Albani
  3. Arifin Mahmud
  4. Kafrawi Muchtar, SH
  5. Farid Effendi, SH.
  
2. Narasumber seminar hari lahir dan logo. :
  1. Kadin Budparpora
  2. Drs.H. Kamaruddin, AK
  3. H. Nurdin Yusuf, S.Pd
  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan
  5. Drs. Alizar Amir.
  
3. Tim pembahas :
  - a. Tim Juri lomba Logo daerah. :
    1. Staf Ahli bid. Pemerintahan (Koordinator)
    2. Willy Siswanto
    3. Bustami Rahman
    4. Sutejo
    5. Hongki Listiadi.
  
  - b. Moderator seminar : Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Budparpora.
  
  - c. Notulen seminar :
    1. Fandiar, SH
    2. Lalita TD Nst, SH.
  
  - d. Pembahas seminar logo, bendera bendera jabatan kepala daerah dan hari jadi Kota Pangkalpinang. :
    1. Drs. H. Anwar effendi (Koordinator)
    2. Drs. H. Sjahrum HS, MM
    3. Kepala BLH
    4. Agus Candra
    5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
    6. Kepala Dinas PU.

**Kelompok Kerja III  
(Pokja III)**

Membidangi Hymne  
Kota Pangkalpinang.

1. Tenaga ahli (tim penyusun) Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Kadin Pendidikan (Koordinator)
  2. M. Rivani
  3. Staf ahli bidang Hukum dan Politik
  4. Sekretaris Dinas Pendidikan
  5. Drs. Suroso.

2. Narasumber seminar Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Kabag. Humas dan Protokol (Koordinator)
  2. Jujur Sinaga
  3. Rusli
  4. Risma S
  5. Sekretaris BLH.
  
3. Tim pembahas seminar Hymne Kota Pangkalpinang. :
  1. Kabid. Kebudayaan Disbudparpora
  
  2. Ketua Dewan Kesenian Kota Pangkalpinang
  3. Drs.H. Badaruddin, Usman
  4. Kepala Bagian administrasi Pembangunan dan SDA
  5. Kasi Kesenian dan Perfilman Disbudparpora
  6. Kepala SMAN 1 Pangkalpinang
  7. Kepala SMAN 2 Pangkalpinang
  8. Kepala SMAN 3 Pangkalpinang
  9. Kepala SMAN 4 Pangkalpinang
  10. Kepala SMKN 3 Pangkalpinang.

Lampiran : Keputusan Walikota Pangkalpinang  
Nomor : 308/KEP/ORG/IV/2010  
Tanggal : 27 April 2010

Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang :

Koordiantor	:	Drs. Akhmad Elvian
Anggota	:	1. Suhaimi Sulaiman, BA
		2. Drs. H. Sjahrum HS, MM
		3. Drs. H. Anwar Effendi
		4. Drs. H. Kamaruddin AK
		.5. Farid Effendi, SH
		6. Nurdin Yusuf, S.Pd
		7. Drs. Edison Taher
		8 Hongki Listiadi
		9. Sutejo.

## B. Daftar Pustaka:

- Bakar, A.A: Barin Amir Tikal Pahlawan-pahlawan Nasional Jang Tak Boleh Dilupakan, Jajasan Pendidikan Rakyat Bangka, 10 November 1969.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Sumatera Selatan, Juli 1983.
- Elvian, Akhmad: Sejarah dan Budaya Pangkalpinang, Pangkalpinang Kota Pangkal Kemenangan, Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, cetakan pertama, November 2005.
- Elvian, Akhmad: Depati Amir Pahlawan Nasional, sebuah artikel Bangka Pos, Pangkalpinang, 19 Mei 2006.
- Elvian, Akhmad: Setengah Abad Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom, Pangkalpinang, November 2006
- Elvian, Akhmad: Toponim Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang, Oktober 2009.
- Erman, Erwinza: Menyigi Sejarah Perjuangan Bangka, Depati Bahrin dan Depati Amir, sebuah makalah Seminar Kepahlawanan Depati Amir, Pangkalpinang, 28 Agustus 2004.
- Heidhues, Somers, F, Mary: Bangka Tin And Mentok Pepper, Chinese Settlement on an Indonesia Island, Social Issues in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies.
- Machmud, Arifin, MHD: Pulau Bangka dan Budayanya Jilid II, 1986.
- Notosusanto, Nugroho, Drs, TNI, Brigjen : 30 tahun Indonesia Merdeka, PT Tiara Pustaka Jakarta, Cetakan Kelima, tahun 1981.
- Pemerintah Kota Pangkalpinang: Hari Jadi Kota Pangkalpinang ke-45 (Sejarah dan Perkembangannya), Pangkalpinang 14 November 2001.
- Proyek Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Asdep Urusan Sejarah Nasional, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: Tempat Pengasingan dan Makam Pejuang Bangsa, Simpul-simpul Perikat Keindonesiaan, Jakarta 2003.
- Raden Ahmad: Riwayat Poelau Bangka Berhoeboeng dengan Palembang, 1936.
- Sirjamaki, Jhon: The Sociology of Cities, New York, Random House, 1964.
- Suryadi, Agus, Drs: Perkembangan Pemerintah di Pangkalpinang, sebuah makalah, tahun 2004.
- Zed, Mestika: Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan, Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 1997.
- Umar, Husein: Metode Riset Perilaku Organisasi, PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003.
- Mr. Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd, Pengertian Sejarah, dikutip dari berita yang diposkan pada Aufklarung For All, 29 Februari 2008.
- Laporan hasil kerja Tim Perumus, Tinjauan tentang Hari Jadi Kota Pangkalpinang dari Pendekatan Sosio Historis, 2010.

# **BAGIAN KEDUA**

## 1. KONSIDERAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan masyarakat dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa dalam rangka upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya Daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Hari Jadi Kota Pangkalpinang;
  - c. Bahwa untuk menetapkan Hari Jadi Kota Pangkalpinang telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menggali sejarah tentang terbentuknya Kota Pangkalpinang;
  - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Perumus Hari Jadi Kota Pangkalpinang dan setelah mendapatkan masukan-masukan dari sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, para anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta hasil penilaian buku dan sejarah yang telah disosialisasi dan diinformasikan tanggal 10 Agustus 2010 maka ditentukanlah Hari Jadi Kota Pangkalpinang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

## 2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonom Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2001 Nomor 07 Seri D Nomor 7).

### **3. KETENTUAN UMUM**

Pemaknaan dan pengertian terhadap substansi materi yang diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal, mencakup:

- a. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
- c. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- h. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Pangkalpinang ;
- i. Kelurahan atau sebutan lain adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan ;
- j. Hari Jadi Kota Pangkalpinang adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kota Pangkalpinang;
- k. Naskahriwayat singkat adalah himpunan data yang diperoleh dari berbagai unsur yang telah disusun secara sistematis;
- l. Peringatan Hari Jadi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tepat pada tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.

#### **4. MATERI**

Materi yang hendak diatur dan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang adalah penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, mencakup:

- a. Penetapan tanggal, bulan dan tahun hari jadi Kota Pangkalpinang;
- b. Naskah riwayat singkat hari jadi Kota Pangkalpinang;
- c. Peringatan hari Jadi Kota Pangkalpinang, dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa Dewan dengan agenda pembacaan naskah riwayat singkat Hari Jadi Kota Pangkalpinang dan perkembangannya yang disusun oleh Walikota Pangkalpinang;
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

#### **5. KETENTUAN PIDANA**

**Pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya (jika perlu).**

Ketentuan pidana pada raperda penetapan hari jadi Kota Pangkalpinang, tidak diatur secara khusus.

#### **6. KETENTUAN PERALIHAN**

Didalam ketentuan peralihan, dijelaskan hal-hal yang menyangkut:

- a. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan daerah baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah yang baru itu mulai berlaku.
- b. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah yang baru.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**JADWAL KEGIATAN PERUBAHAN LAMBANG DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2010**

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu																											
			Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Rapat awal tim perubahan lambang daerah	▪ Panitia			√																									
2.	Rapat pematapan tim perubahan lambang daerah	▪ Panitia				√																								
3.	Penyusunan SK Panitia	▪ Panitia							√																					
4.	Penyampaian SK kepada seluruh panitia	▪ Panitia											√																	
5.	Penelitian hari lahir Kota Pangkalpinang	▪ Pokja II											√								√									
6.	Pengumuman dan pelaksanaan sayembara logo daerah dan perumusan hymne dan mars kota Pangkalpinang	▪ Pokja I ▪ Pokja II ▪ Panitia																			√					√				
7.	Pelaksanaan sayembara atau rapat tim penyempurnaan dan rapat tim hymne dan mars Kota Pangkalpinang	▪ Pokja I ▪ Pokja II ▪ Panitia																			√				√					
8.	Penilaian oleh tim juri atau rapat tim penyempurnaan logo kota oleh tim	▪ Pokja II																				√					√			
9.	Sosialisasi dan Informasi mengenai hasil akhir Lambang Daerah Kota Pangkalpinang yang mencakup HARI Jadi, Logo, Hymnedan Mars Kota Pangkalpinang	▪ Pokja I ▪ Pokja II ▪ Pokja III ▪ Panitia																											√	
10.	Penyusunan draft raperda lambang daerah dan penetapan hari jadi kota Pangkalpinang	▪ Panitia															√													√
11.	Penyampaian draft raperda lambang daerah dan penetapan hari jadi kota Pangkalpinang ke DPRD Kota Pangkalpinang	▪ Panitia																												√

Pangkalpinang, Februari 2010

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

DEDY RISTRANTO, S.Sos  
Pembina  
NIP 197012181998031010